Laporan Kinerja LPSPL Sorong Triwulan III Tahun 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS WBK WBBM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong. Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong Triwulan III Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati. Pada LKj Triwulan III Tahun 2025 kami sampaikan capaian indikator kinerja pada Triwulan III Tahun 2025, perbandingan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi, kegiatan pendukung, rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2025, dan realisasi anggaran yang terserap pada triwulan III Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan LPSPL Sorong triwulan III tahun 2025.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk secara bersama-sama berupaya mencapai target kinerja sesuai yang telah disepakati pada triwulan III tahun 2025 ini. Semoga LKj ini dapat menjadi salah satu masukan bagi organisasi yang lebih luas sebagai upaya perbaikan demi kemajuan pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan ini, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik maupun evaluasi yang membangun akan kami terima dengan senang hati sebagai perbaikan di masa mendatang.

Sorong, 17 Oktober 2025

Kepala LPSPL Sorong

Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun secara periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada LKj Triwulan III Tahun 2025 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja (Lkj) LPSPL Sorong Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan LPSPL Sorong dalam jangka waktu 1 (satu) triwulan dari Bulan Juli sampai Bulan September 2025. Pada pelaporan LKj Triwulan III Tahun 2025 data capaian dan target LPSPL Sorong telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan dalam folder bit.ly/SAKIPDJPK2025 serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Pada tahun triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong memiliki target 17 Indikator Kinerja (IK), dengan rincian :

1. LPSPL Sorong mempunyai 2 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
    a. IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong tercapai 100% dari target 95% dengan persentase kinerjaku 105,26%
    b. IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 100% dari target 76% dengan persentase kinerjaku 120%

2. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target kinerja yaitu:
    a. IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 3 dokumen dari target 3 dokumen dengan persentase capaian 100%,

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2025, DIPA awal LPSPL Sorong tahun 2025 sebesar Rp40.227.209.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp8,450,539,000,00; PNBP sebesar Rp1,625,000,000,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp30,151,670,000,00 yang terbit pada tanggal 30 November 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 24 Januari 2025. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2025 dengan Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477440/2025 tanggal 2 Desember 2024. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp30,651,670,000,00, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp1.125.000.000,00, dan program dukungan manajemen sebesar Rp8.450.539.000,00. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 4 kegiatan yaitu (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp825,000,000,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8,450,539,000,00. Pada revisi DIPA 1 s.d 4 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp10.502.610.000,00 yang terdapat pada belanja 52 sedangkan pada Revisi DIPA ke 5 tanggal 17 Juni 2025 dengan nomor SP DIPA-032.07.2.477440/2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNBP sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. Realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Rincian serapan anggaran LPSPL Sorong Per RO (Lampiran V) yaitu Rp 7,291,063,470 atau 18.12% dari anggaran Rp40,227,209,000.

Pengukuran Kinerja capaian kinerja LPSPL Sorong dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan III Tahun 2025 adalah **109,47** (kategori Hijau=Baik) (*kinerjaku.kkp.go.id*).

Guna meningkatkan capaian kinerja LPSPL Sorong pada tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terkait deviasi dan DIPA LPSPL Sorong serta melakukan revisi pertama halaman III DIPA pada triwulan III tahun 2025. Pada Triwulan IV perlu dilakukan percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari PNBP dan Pinjaman Luar Negeri karena persentase serapannya relative rendah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*) 1

1.4 Tugas dan Fungsi 4

1.5 Sistematika Penulisan 7

2 PERENCANAAN KINERJA **8**

2.1 Rencana Strategis 2024-2029 8

2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 10

3 AKUNTABILITAS KINERJA **14**

3.1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong 16

3.1.1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) 16

3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong 26

3.2.1. IK 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) 26

3.3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong 29

3.3.1. IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) 29

3.4 Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong 33

3.4.1. IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) 33

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong 36
3.5.1. IK 5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) 37
3.6 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong 41
3.6.1. IK 6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) 41
3.7 Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong 44
3.7.1. IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) 44
3.7.2. IK 8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) 47
3.7.3. IK 9 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DJPKRL LINGKUP LPSPL SORONG (NILAI) 50
3.8. Akuntabilitas Anggaran 77
3.9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 82
4 PENUTUP 87
4.1 Kesimpulan 87
4.2 Rekomendasi 87
4.3 Tindaklanjut Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong 6
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPSPL Sorong 7
Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 11
Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 13
Tabel 3.1 IK Target dan Realisasi Kinerja LPSPL Sorong Triwulan III Tahun 2025 14
Tabel 3.2 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) 17
Tabel 3.3 Capaian IKU 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) 27
Tabel 3.4 Capaian IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) 30
Tabel 3.5 IK 6 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) 34
Tabel 3.6 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) 37
Tabel 3.7 Capaian IKU 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) 41
Tabel 3.8 Kategori nilai PM SAKIP 45
Tabel 3.9 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) 45
Tabel 3.10 Bobot Penilaian IKPA 48
Tabel 3.11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) 48
Tabel 3.12 Tabel Bobot Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker 54
Tabel 3.13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup Lpspl Sorong (Nilai) 55
Tabel 3.14 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) 57
Tabel 3.15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) 60
Tabel 3.16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) 62
Tabel 3.17 Capaian IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%) 65
Tabel 3.18 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) 70
Tabel 3.19 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) 72
Tabel 3.20 Bobot Penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik 75
Tabel 3.21 Capaian IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) 76
Tabel 3.22 Rincian Sumber Anggaran LPSPL Sorong Tahun 2025 78
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Per Indikator pada Perjanjian Kinerja 79
Tabel 3.24 Daftar kegiatan dan pagu anggaran 82
Tabel 3.25 Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada triwulan I tahun 2025. 83
Tabel 3.27 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong 5
Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong 6
Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Triwulan III Tahun 2025. 14
Gambar 3.2 Rapat Koordinasi *dan Cross Visit* Pengelola Kawasan Konservasi 18
Gambar 3.3 Pelaksanaan Surveilance Patrol Inside KKD Raja Ampat dan KKD Mare 22
Gambar 3.4 Pelaksaan Bimtek Pengelolaan Kawasan Konservasi 23
Gambar 3.5 Pelatihan Pokmaswas Level Pemula 29
Gambar 3.6 Pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah dan/atau apendiks CITES 32
Gambar 3.7 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Saumlaki 36
Gambar 3.8 Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil di Wilker LPSPL Sorong 40
Gambar 3.9 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung IK 4 43
Gambar 3.10 Dokumentasi pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong setiap bulan 47
Gambar 3.11 Tangkapan Layar Laporan SPIP TW IV tahun 2024, SPIP TW I Tahun 2025 dan SPIP TW II Tahun 2025 58
Gambar Gambar 3.12 *Screenshot* Penilaian IP ASN Triwulan III tahun 2025 60
Gambar 3.13 Screenshot aplikasi SIDAK KKP 63
Gambar 3.14 Rapat Mingguan Pembangunan WBK WBBM Lingkup LPSPL Sorong 68
Gambar 3.15 Hasil Penilaian Kearsipan Internal LPSPL Sorong 70
Gambar 3.16 Tangkapan layar persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III tahun anggaran 2025 73

BAB
1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini adalah untuk menyampaikan capaian kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan LPSPL Sorong pada triwulan III tahun 2025.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini akan diterapkan secara merata di seluruh daerah dan akan dievaluasi secara berkala. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) memiliki peran strategis

dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang laut. Selain itu, Ditjen PKRL juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan, termasuk rehabilitasi, restorasi, pemanfaatan ekonomi, konservasi ekosistem laut dan biota, penanggulangan bencana kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

LPSPL Sorong berkedudukan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan. LPSPL Sorong sejak tahun 2011 telah memiliki 2 (dua) satker definitif yang berkedudukan di Kota Ambon dan Kabupaten Merauke (Permen-KP No. 65/PERMEN-KP/2020 jo Permen-KP No. PER-23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permen-KP No. PER-22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut).

LPSPL Sorong memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut mulai dari target rutin tahunan hingga tantangan yang diturunkan melalui Astacita Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
    a. Fasilitasi Penyusunan materi teknis ruang dalam perumusan RTR Provinsi/RZ KAW dan RTR KSN/T dan Integrasi Dukungan penyusunan materi teknis ruang laut yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
    b. Pendampingan Integrasi antara rencana tata ruang wilayah provinsi dengan RZWP3K, Integrasi antara rencana tata ruang KSN dengan rencana zonasi KSN/T di wilayah kerja LPSPL Sorong;
    c. Pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
    d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja LPSPL Sorong;

e. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
f. Pengelolaan data KKPRL.

2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
   a. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   b. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   d. Pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   f. Rehabilitasi Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   g. Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   h. Pelayanan perizinan/peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   i. Inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   j. Pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LPSPL Sorong.
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
   a. Identifikasi dan Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah kerja LPSPL Sorong;
   b. Dukungan Identifikasi dalam rangka fasilitasi KKPRL untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah kerja LPSPL Sorong;
   c. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja LPSPL Sorong.
4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:
   a. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan ditanggunglangi pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong;

b. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Sorong.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKRL melalui:
   a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LPSPL Sorong;
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di LPSPL Sorong;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di LPSPL Sorong;
   d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di LPSPL Sorong;

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PRL). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (UPT PKRL) tersebut dipimpin oleh kepala. UPT PRL terdiri atas UPT KKPN dan UPT PSPL. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL). Klasifikasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tersebut didasarkan pada analisis beban kerja.

LPSPL Sorong sebagai salah satu UPT PRL mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kealutan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
b. pelaksanaan pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;

c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi LPSPL Sorong sesuai dengan peraturan tersebut, sebagaimana berikut:

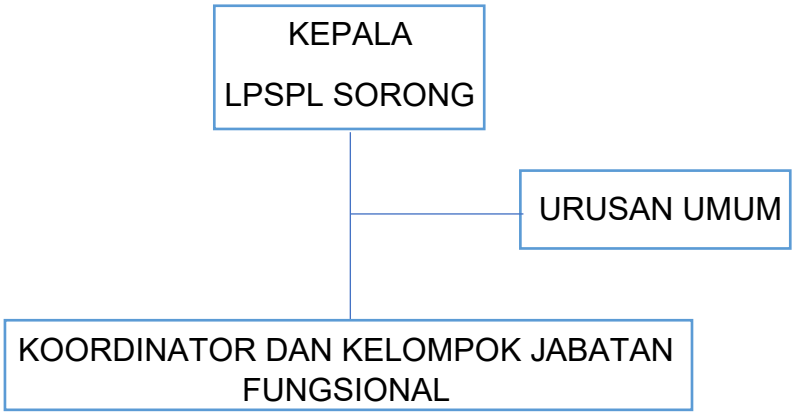

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong

Susunan organisasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PRL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dipimpin oleh koordinator satuan kerja. Koordinator satuan kerja tersebut ditetapkan oleh Dirjen PRL. Berikut lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja LPSPL Sorong berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020:

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong

UPT	Lokasi	Satuan Kerja	Wilayah Kerja
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL)	Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Ambon	Provinsi Maluku
		Ternate	Provinsi Maluku Utara
		Merauke	Provinsi Papua Selatan
		-	Provinsi Papua
		-	Provinsi Papua Pegunungan
		-	Provinsi Papua Tengah
		-	Provinsi Papua Barat
		-	Provinsi Papua Barat Daya

Wilayah Kerja LPSPL Sorong sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Pada triwulan III tahun 2025, jumlah SDM yang dimiliki LPSPL Sorong mencapai 45 orang yang terdiri dari 29 orang PNS, 2 orang PPPK, 20 orang tenaga kontrak jasa perorangan, dan 2 PPNPN dengan komposisi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPSPL Sorong

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan				Total
		SMA/Sederajat	D3	D4/S1	S2	
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	21	6	29
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	-	-	2	-	2
3.	Tenaga Kontrak Jasa Perorangan (JLP)	10	2	8	-	20
4.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	-	1	1	-	2
Jumlah		**11**	**4**	**32**	**6**	

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah:

a. **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2024-2029, rencana kerja dan anggaran LPSPL Sorong tahun 2025, dan penetapan kinerja LPSPL Sorong

c. **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan orgainsasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. **BAB IV Penutup**

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB
2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2024-2029

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP.

RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putera puteri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PKRL 2024-2029 adalah “Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2024-2029, KKP misi sesuai misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional,

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melaluli Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung Misi KKP tersebut, Ditjen PKRL mempunyai 3 (tiga) Misi yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PKRL.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2024-2029, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PKRL terdiri dari:

SS-1 Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan,

SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan,

SS-3 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas,

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PKRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan kelautan dan ruang laut serta program dukungan manajemen.

2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025

Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 dan diubah dengan Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang ditanda tangani pada tanggal Juni 2025 yang memuat 16 Indikator Kinerja dengan anggaran sebesar Rp39.402.209.000,00 yang mendukung kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	3
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	20
3.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong	3.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	3
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	70
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	71,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	80
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)	95
		12.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75
		14.	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	80
		15.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	91

Selain itu terdapat Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang ditanda tangani pada Mei 2025 yang memuat 1 Indikator Kinerja dengan anggaran Rp885.000.000,00 yang mendukung kegiatan Perlindungan dan Penataan Ruang Laut Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	2

Sumber anggaran LPSPL Sorong pada tahun 2025 berasal dari Rupiah Murni Rp 8,450,539,000, pinjaman luar negeri Rp 30,151,670,000 dan PNBP Rp. 1,625,000,000, akan tetapi pada halaman IV.A DIPA Nomor: DIPA-032.07.2.477440/2024 dijelaskan bahwa terdapat jumlah dana yang tidak dapat dicairkan sejumlah Rp. 10,502,610,000 yang merupakan belanja barang (52). Pada revisi DIPA dengan nomor SP DIPA-032.07.2.477440/2025 tanggal 17 Juni 2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNBP sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. sehingga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan.

BAB
3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja LPSPL Sorong dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU/IKM. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui http://kinerjaku.kkp.go.id/. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja LPSPL Sorong pada Triwulan III Tahun 2025 adalah **109,47** (kategori Hijau=Baik), seperti gambar 3.1 berikut:

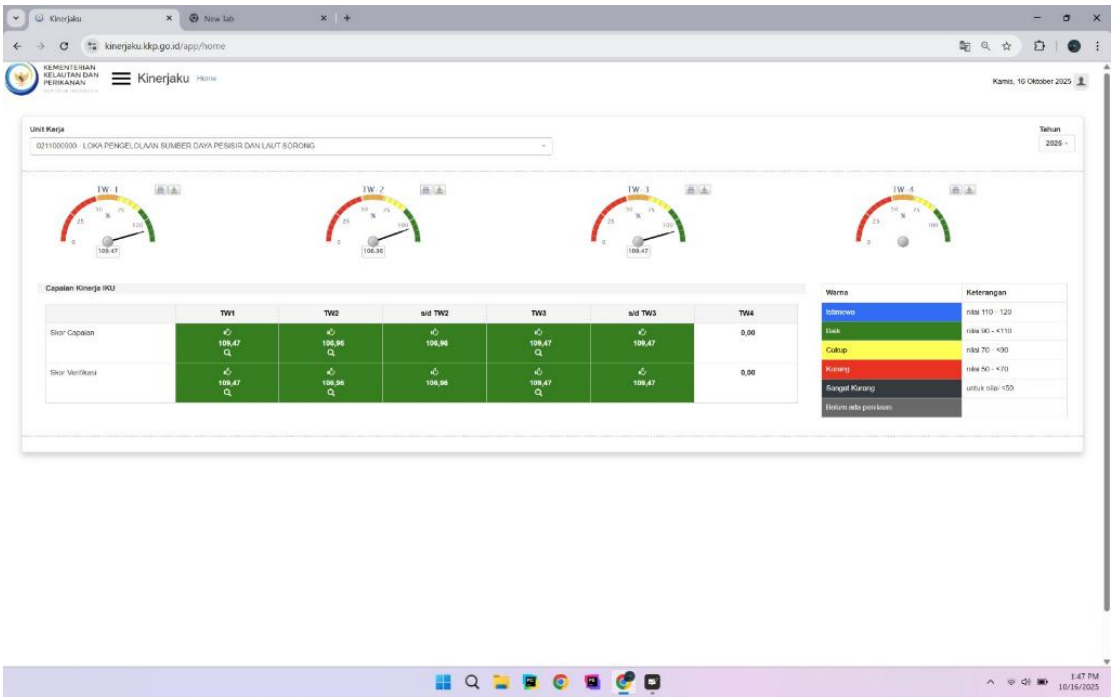

Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Triwulan III Tahun 2025.

Indikator Kinerja (IK) serta target dan realisasinya pada triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 IK Target dan Realisasi Kinerja LPSPL Sorong Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 1. **Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong**						
IK		**FREKUENSI**	**TARGET**	**TAHUN 2025**		
				TARGET	**REALISASI**	**% KINERJAKU**
IK 1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	Tahunan	3	-	-	-

Sasaran Kegiatan 2. **Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong**						
IK 2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	Tahunan	20	-	-	-
Sasaran Kegiatan 3. **Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong**						
IK 3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	Tahunan	3	-	-	-
Sasaran Kegiatan 4. **Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong**						
IK 4	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	Tahunan	2	-	-	-
Sasaran Kegiatan 5. **Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong**						
IK 5	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	Tahunan	1	-	-	-
Sasaran Kegiatan 6. **Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong**						
IK 6	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	80	-	-	-
Sasaran Kegiatan 7. **Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong**						
IK 7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	70	-	-	-
IK 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Semesteran	85	-	-	-
IK 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	71,5	-	-	-
IK 10	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	Triwulan	3	-	3	100%

IK 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	Semester	88	-	-	-
IK 12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)	Tahunan	95	-	100	105,26%
IK 13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	Tahunan	100	-	-	-
IK14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-
IK 15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	80	-	-	-
IK 16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	Tahunan	76	-	100	120%
IK 17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	91	-	-	-

3.1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 ini kedalam 1 IKU yaitu Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi).

3.1.1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi dan/atau dilakukan pendampingan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong adalah jumlah daerah (provinsi) di wilayah kerja LPSPL Sorong yang dilakukan fasilitasi oleh LPSPL Sorong dalam upaya pengelolaan Kawasan konservasi.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi dan/atau dilakukan pendampingan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi

Tabel 3.2 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)

SK.1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong							
IK.1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)							
Realisasi 2024		Tahun 2025					Tahun 2025	
TW III	Target 2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	3	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) Triwulan III Tahun 2025***

   Target IKU Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) pada tahun 2025 yaitu 3 Provinsi. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2025 IKU ini belum bisa diukur capaiannya.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024***

   Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini adalah tahunan dan merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala, dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   LPSPL Sorong aktif melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan efektivitas Kawasan konservasi Daerah. Hal ini juga didukung oleh SDM LPSPL Sorong yang memiliki kemampuan dalam upaya mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi seperti inventarisasi sumber daya ekologi, sosial, ekonomi dan budaya di dalam Kawasan Konservasi sehingga mampu berkontribusi secara langsung untuk mendukung peningkatan efektivitas Kawasan konservasi.

   b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

   Pelaksanaan IKU ini direncanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) *Ocean for Prosperity* namun anggaran tersebut baru

dapat direalisasikan pada Juni 2025 karena adanya penghentian sementara kegiatan LAUTRA berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat meningkatkan kerja sama dengan mitra konservasi dan pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan IKU ini dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi anggaran yang ada.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK* Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)

Mendukung capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong telah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi *dan Cross Visit* Pengelola Kawasan Konservasi pada tanggal 7–10 Juli 2025 di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola kawasan konservasi dan perwakilan dari dinas teknis kelautan dan perikanan, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, serta Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antardaerah, mendorong pembelajaran lintas lokasi, serta menyusun kebutuhan kawasan yang dapat didukung/sinergikan dengan program Lautra.

Gambar 3.2 Rapat Koordinasi *dan Cross Visit* Pengelola Kawasan Konservasi

Mendukung Upaya pengawasan dan monitoring pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan Surveilance patrol inside di Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya dan Kawasan Konservasi Daerah Mare, Provinsi Maluku Utara. Patroli

di KKP Raja Ampat mencakup beberapa area utama, termasuk Area I (Kepulauan Ayau-Asia), Area II (Teluk Mayalibit), Area III (Selat Dampier), Area V (Kofiau-Boo), dan Area VI (Kepulauan Fam).

Temuan Utama dan Aktivitas yang Dilakukan

Aktivitas Pemanfaatan Kawasan:

- **Perikanan Tangkap:** Ditemukan beragam aktivitas perikanan, mayoritas dilakukan oleh nelayan tradisional yang menggunakan longboat dengan mesin 15 PK atau ketinting. Alat tangkap yang dominan adalah pancing ulur (handline) dan panah (speargun). Aktivitas ini terpantau di zona pemanfaatan, zona lainnya, namun beberapa juga ditemukan di zona inti.
- **Pariwisata:** Aktivitas pariwisata cukup tinggi, terutama di sekitar Selat Dampier dan Kepulauan Fam. Ditemukan wisatawan mancanegara (dari Australia, Amerika, Jerman, dll.) yang melakukan kegiatan *diving* dan *snorkeling*. Kapal-kapal pinisi wisata juga terpantau beroperasi di zona yang telah ditentukan.
- **Budidaya:** Ditemukan beberapa kegiatan budidaya, seperti Keramba Jaring Apung (KJA) milik masyarakat untuk budidaya ikan kerapu hidup di Desa Yanbebar (Batanta) dan Kepulauan Ayau. Selain itu, teridentifikasi juga aktivitas budidaya mutiara oleh PT Arta Samudra dan CV Yefga.
- **Penelitian:** Di Teluk Mayalibit, terpantau adanya kegiatan penelitian oleh Fauna & Flora International (FFI) yang fokus pada observasi perilaku lumba-lumba.

Pelanggaran dan Penindakan:

1. **Pelanggaran Zonasi (Zona Inti):** Ini adalah pelanggaran yang paling sering ditemukan di hampir semua area patroli. Banyak nelayan yang tertangkap melakukan aktivitas penangkapan ikan di dalam zona inti, seperti di sekitar Pulau Nelayan (Area III) dan di perairan Ayau (Area I). Tim patroli secara konsisten melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman mengenai batas-batas zonasi, dan mengarahkan para nelayan untuk keluar dari zona terlarang.
2. **Pemanfaatan Satwa Dilindungi:**
    - **Penyu:** Sebuah temuan signifikan terjadi di Kepulauan Ayau pada bulan September, di mana ditemukan satu ekor penyu sisik hidup di dalam KJA milik warga yang berlokasi di zona inti. Setelah pendekatan persuasif dan sosialisasi mengenai status perlindungan penyu, pemilik KJA bersedia melepaskan penyu

tersebut. Proses pelepasliaran dilakukan oleh tim gabungan. Pada bulan Juli di lokasi yang sama, ditemukan juga nelayan yang menangkap penyu hijau menggunakan panah.

- **Hiu:** Pada patroli Juli di Selat Dampier, tim menemukan dua kapal (KM Ria Purnama dan KM La Vero 3) yang melakukan pemanfaatan hiu menggunakan alat tangkap rawai. Berbagai jenis hiu (seperti *Carcharhinus falciformis*, *Sphyrna sp*, dll.) ditemukan di atas kapal. Petugas PSDKP dan BLUD Raja Ampat segera mengambil tindakan tegas dengan menyita dan memusnahkan seluruh hasil tangkapan hiu tersebut.

3. **Penggunaan Alat Tangkap Terlarang:** Di Selat Dampier, ditemukan nelayan yang menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan untuk menangkap ikan, sebuah metode yang dilarang. Tim patroli membongkar *camp* singgah milik nelayan tersebut sebagai tindakan tegas yang bersifat edukatif.
4. **Administrasi dan Perizinan:** Beberapa KJA yang beroperasi diketahui belum memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Selain itu, dalam kegiatan pariwisata, ditemukan dua wisatawan asing yang tidak mengetahui kewajiban membayar PIN Raja Ampat.

Keanekaragaman Hayati: Selama patroli, tim berulang kali menjumpai mamalia laut, terutama lumba-lumba hidung botol, di perairan Selat Dampier dan Kofiau-Boo. Kemunculan ini menjadi indikator positif kesehatan ekosistem laut di kawasan tersebut.

Patroli di KKD Pulau Mare, Maluku Utara, juga menunjukkan tantangan serupa terkait kepatuhan terhadap zonasi.

Temuan Utama dan Aktivitas:

- **Dominasi Aktivitas Perikanan:** Sebagian besar aktivitas yang ditemukan adalah penangkapan ikan oleh nelayan lokal dari Desa Maregam dan Marekofo, serta nelayan dari pulau sekitar seperti Tidore.
- **Pelanggaran Berulang di Zona Inti:** Tim patroli secara konsisten menemukan nelayan yang beraktivitas di dalam dan di sekitar zona inti. Posisi zona inti yang terekspos ke arah Kota Tidore menjadi salah satu pemicu tingginya potensi pelanggaran dari nelayan luar.

- **Penggunaan Alat Tangkap Ilegal:** Pada patroli September, tim menemukan kapal yang membawa jaring (*kalase*), yang merupakan alat tangkap yang dilarang penggunaannya di KKD Pulau Mare berdasarkan Rencana Zonasi (RZP).
- **Bangunan Ilegal:** Ditemukan sebuah bangunan berupa *shelter* yang didirikan di atas pasir timbul yang masuk dalam zona inti di bagian utara Pulau Mare.

Tindakan yang Dilakukan:

- Tim gabungan aktif melakukan sosialisasi langsung di laut kepada para nelayan mengenai status KKD Pulau Mare, aturan zonasi, dan jenis alat tangkap yang dilarang.
- Nelayan yang ditemukan di zona inti diarahkan untuk segera berpindah ke zona perikanan berkelanjutan.
- Terhadap kapal yang membawa jaring, tim memberikan himbauan keras dan sosialisasi terkait larangan serta pentingnya kepemilikan surat izin seperti SIUP/SIPI.

Catatan Khusus Berdasarkan Hasil Patroli

1. **Tantangan Utama adalah Kepatuhan Zonasi:** Pelanggaran zona inti menjadi temuan paling konsisten di kedua kawasan konservasi. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi yang lebih masif dan mungkin pemasangan tanda batas fisik yang lebih jelas di beberapa titik strategis.
2. **Efektivitas Patroli Gabungan:** Keterlibatan berbagai instansi (PSDKP, Polairud, BLUD, DKP) dalam satu tim terbukti sangat efektif, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan penindakan hukum seperti pemanfaatan hiu dan penyu.
3. **Pendekatan Persuasif dan Edukatif:** Mayoritas tindakan yang diambil di lapangan adalah sosialisasi dan edukasi. Ini merupakan pendekatan yang baik untuk membangun kesadaran jangka panjang di tingkat masyarakat, meskipun tindakan tegas tetap diperlukan untuk pelanggaran berat.
4. **Kendala Operasional:** Laporan dari Kofiau-Boo menyebutkan adanya kendala teknis (kerusakan mesin speedboat) yang menghambat jangkauan patroli. Hal ini menyoroti pentingnya kesiapan logistik dan sarana prasarana yang andal untuk mendukung efektivitas pengawasan di wilayah yang luas dan terpencil.
5. **Peran Informasi Masyarakat:** Informasi dari nelayan lokal di Kofiau-Boo mengenai aktivitas kapal penampung dari luar daerah menjadi masukan berharga bagi tim patroli untuk menargetkan pengawasan. Ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat.

Gambar 3.3 Pelaksanaan Surveilance Patrol Inside KKD Raja Ampat dan KKD Mare

Memperkuat efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Mare dan perairan sekitarnya, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan ini secara khusus dirancang untuk meningkatkan kapasitas Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) serta instansi dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman teoritis yang mendalam dan keterampilan teknis yang praktis terkait metode survei, pemantauan, dan pengelolaan sumber daya pesisir. Pelatihan ini menjadi fondasi penting untuk mempersiapkan para peserta sebelum melaksanakan kegiatan monitoring biofisik dan sosial ekonomi di lapangan, sehingga data yang dihasilkan valid dan sesuai standar.

Kegiatan ini diikuti oleh total 36 peserta dengan partisipasi perempuan mencapai 60%. Peserta merupakan perwakilan dari berbagai lembaga dan kelompok yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan KKD Pulau Mare, antara lain:

- LPSPL Sorong
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara
- Badan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Maluku Utara
- DKP Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- PSDKP Ternate
- Universitas Khairun Ternate

- Perwakilan Penyuluh Perikanan
- Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dari Desa Maregam dan Desa Marekofo
- LSM terkait seperti WCS

Bimtek disajikan dengan menggabungkan sesi teori dan praktik untuk memastikan pemahaman yang komprehensif. Materi utama yang dibahas meliputi:

1. **Monitoring Ekosistem Pesisir:**
    - **Mangrove:** Teknik identifikasi jenis, peran ekologis, dan metode pemantauan.
    - **Lamun:** Pengenalan jenis, fungsi ekosistem, serta teknik pengukuran tutupan dan kepadatan.
    - **Terumbu Karang:** Metode identifikasi karang, desain sampling, dan teknik survei menggunakan metode *Reef Check* atau *Line Intercept Transect (LIT)*.
2. **Monitoring Kualitas Air:**
    - Pengenalan parameter fisika-kimia penting (suhu, salinitas, pH, DO).
    - Teknik pengambilan dan analisis sampel air.
3. **Monitoring Sosial Ekonomi dan Budaya:**
    - Metode identifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir.
    - Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan ini dilengkapi dengan **simulasi praktik langsung**. Dalam simulasi ini, peserta dilatih untuk menggunakan alat peraga, mengisi lembar data, dan melakukan observasi sesuai dengan prosedur standar survei.

Gambar 3.4 Pelaksaan Bimtek Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan dalam rangka implementasi Proyek Ocean for Prosperity (LAUTRA), Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

dan Laut (LPSPL) Sorong bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan monitoring komprehensif di Kawasan Konservasi (KK) Pulau Mare. Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan dan memastikan pengelolaan ekosistem terumbu karang beserta ekosistem terkait lainnya berjalan secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari kegiatan monitoring ini adalah untuk mengumpulkan data dasar (baseline) mengenai kondisi biofisik, sosial ekonomi, dan budaya di dalam kawasan konservasi. Data yang terkumpul akan menjadi acuan untuk evaluasi dan perencanaan pengelolaan KK Pulau Mare di masa mendatang.

Kegiatan ini melibatkan 40 peserta yang merupakan kolaborasi dari berbagai institusi, termasuk LPSPL Sorong, DKP Provinsi Maluku Utara, BKKPD Maluku Utara, Peneliti BRIN, Dosen dan civitas akademika Universitas Khairun Ternate, Pokmaswas (Maregam, Marekofo, Tugulufa), dan LSM Wildlife Conservation Society (WCS).

Monitoring Biofisik

1. **Ekosistem Terumbu Karang:**
   - **Lokasi:** Monitoring dilakukan di 12 stasiun yang tersebar di berbagai zona kawasan.
   - **Metode:** Tim menggunakan metode *Underwater Photo Transect (UPT)* untuk data kesehatan terumbu karang (*Reef Health Monitoring*), *Belt Transect* untuk monitoring ikan karang, dan megabentos.
   - **Output:** Pemasangan transek permanen di 12 stasiun untuk memudahkan monitoring berkelanjutan di masa depan. Data foto bawah air akan dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak CPCe.
2. **Ekosistem Lamun:**
   - **Lokasi:** Pengamatan dilakukan di 12 stasiun, di mana 9 stasiun ditemukan memiliki ekosistem lamun. Tiga stasiun di sisi barat pulau tidak ditemukan lamun karena substrat pantai yang berbatu dan paparan gelombang tinggi.
   - **Temuan:** Teridentifikasi 9 spesies lamun, dengan 4 spesies dominan ditemukan di semua stasiun, yaitu *Thalassia hemprichii, Syringodium isoetifolium, Cymodocea rotundata,* dan *Enhalus acoroides*.

3. Ekosistem Mangrove:

- **Lokasi:** Survei dilakukan di 9 stasiun pengamatan di sekitar Pulau Marekofo dan Maregam.
- **Temuan:** Teridentifikasi 19 spesies mangrove dari 9 famili berbeda. Famili Rhizophoraceae menjadi yang paling beragam.
- **Output:** Tim berhasil mengumpulkan data diameter batang, jumlah semaian, biota asosiasi, serta data tutupan dan ketebalan mangrove menggunakan drone yang akan dianalisis untuk menghasilkan Indeks Nilai Penting (INP).

4. Kualitas Perairan:

- **Lokasi:** Pengambilan sampel dilakukan di 16 titik yang mewakili setiap zona.
- **Hasil In-situ:** Rata-rata suhu perairan 28,53°C, oksigen terlarut (DO) 5,78 mg/L, dan pH 8,26.
- **Output:** Sampel nutrien (amonia, nitrat), fosfat, TSS, Fe, fitoplankton, dan zooplankton telah berhasil dikumpulkan dan akan dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

B. Monitoring Sosial Ekonomi dan Budaya

- **Metode:** Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara langsung kepada 78 responden di Desa Maregam (40 responden) dan Desa Marekofo (38 responden).
- **Temuan:**
  - Masyarakat secara umum mengetahui status kawasan konservasi di wilayah mereka.
  - Ditemukan adanya kearifan lokal yang kuat, seperti **"Boboso"** (larangan mengonsumsi jenis ikan tertentu bagi keturunan Kesultanan Tidore) dan **"Goya"** (larangan menebang pohon di bukit yang kini meluas hingga ke vegetasi mangrove di pesisir).
  - Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pengelolaan laut dan menyuarakan kekhawatiran terkait isu *destructive fishing* (pengeboman ikan) yang terkadang masih terjadi, serta berharap adanya peningkatan pengawasan.

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

LPSPL Sorong akan melakukan kegiatan konsultasi publik 1 dan 2 untuk reviu Rencana Pengelolaan Zonasi KKD Kei Kecil di Provinsi Maluku, penyusunan RPZ KKD Babar di Maluku dan Reviu RPZ di KKD Mare Provinsi Maluku Utara dan KKD Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. LPSPL Sorong juga akan melakukan patroli di KKD Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, KKD Kei Kecil di Maluku dan KKD Mare di Maluku Utara. Selain itu akan dilaksanakan penilaian EVIKA terhadap kawasan konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 2 ini kedalam 1 IKU, yaitu masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang).

3.2.1. IK 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)

Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) adalah Masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong.

Tabel 3.3 Capaian IKU 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)

SK.2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong							
IK.2	Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)							
Realisasi 2024		Tahun 2025					Tahun 2025	
TW III	Target 2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	20	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) Triwulan III Tahun 2025***

   Target IK Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) pada tahun 2025 yaitu 20 Orang. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2025 IKU ini belum bisa diukur capaiannya.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

   Sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru oleh sebab itu indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

      LPSPL Sorong memiliki hubungan yang baik dan mendapat dukungan dari Pengelola Kawasan Konservasi Daerah serta Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait lainnya di wilayah kerja LPSPL Sorong. Selain itu banyak mitra kerja konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong yang aktif dalam melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di dalam kawasan konservasi yang siap mendukung rencana kerja LPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

IKU ini direncanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) Ocean for Prosperity namun anggaran tersebut belum dapat dicairkan pada Juni 2025 karena adanya penghentian sementara kegiatan LAUTRA berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat meningkatkan kerja sama dengan mitra konservasi dan pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan IKU ini dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi anggaran yang ada.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 2*

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IK ini adalah Pelatihan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Level Pemula. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi anggota Pokmaswas, memperkuat peran aktif masyarakat dalam aksi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya secara berkelanjutan, meningkatkan sinergi antara Pokmaswas dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi dan aparatur pemerintah terkait lainnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan dari Pokmaswas atau calon Pokmaswas dari 4 kawasan/calon kawasan konservasi. Selama tiga hari efektif, para peserta dibekali dengan berbagai materi yang esensial untuk menjalankan tugas sebagai pengawas berbasis masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup:

1. **Building Learning Commitment:** Membangun komitmen dan semangat belajar bersama.
2. **Kelembagaan Pokmaswas:** Pemahaman mengenai struktur, peran, dan fungsi organisasi Pokmaswas.
3. **Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan:** Pengetahuan dasar mengenai pentingnya konservasi dan jenis-jenis biota yang perlu dilindungi.
4. **Prosedur Operasional Standar (POS) Pokmaswas:** Panduan langkah-demi-langkah dalam menjalankan tugas pengawasan.

5. **SOP Pokmaswas:** Prosedur teknis terkait pelaporan dan penanganan temuan di lapangan.
6. **Komunikasi Efektif:** Keterampilan berkomunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Untuk mengukur efektivitas pelatihan, penyelenggara melakukan evaluasi pembelajaran melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dari para peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian materi.

Gambar 3.5 Pelatihan Pokmaswas Level Pemula

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

LPSPL Sorong akan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam Upaya pemanfaatan Kawasan konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

3.3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 3 ini kedalam 1 IKU yaitu Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis).

3.3.1. IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species;

b. Pendampingan/Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan;

Target jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan adalah Hiu, Pari, dan Arwana di wilayah kerja LPSPL Sorong. Formula perhitungan IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan melalui Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau *look alike species* dan Pendampingan/Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong dalam kurun waktu 1 Tahun.

Tabel 3.4 Capaian IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

SK.3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong							
IK. 3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)							
Realisasi 2024		Tahun 2025					Tahun 2025	
TW I	Target 2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	3	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) Triwulan III Tahun 2025***

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian. Jenis ikan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan hingga triwulan III adalah Hiu, Pari, Arwana dan Teripang.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan 2025 yaitu tahunan. Sehingga pada triwulan III tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

a. Analisis Keberhasilan

Terdapat sosialisasi SOP pelayanan Hiu dan Pari di wilayah kerja LPSPL Sorong kepada pelaku usaha Hiu dan Pari secara berkala, adanya transparansi dalam pelayanan penerbitan SR dan SAJI-DN, pelayanan berbasis aplikasi e-SAJI juga mempermudah dalam melakukan pelayanan, dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha Hiu dan Pari. Komitmen tersebut tertulis pada Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas. Hal ini juga didukung SDM LPSPL Sorong yang dapat diandalkan/tersertifikasi dalam mengidentifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan serta penguasaan penggunaan system aplikasi e-SAJI. Selain itu, nilai indeks kepuasan masyarakat pada triwulan III tahun 2025 pada aplikasi susan KKP adalah 97,22 (sangat baik). Pelayanan LPSPL Sorong juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015 dan mendapat predikat pelayanan prima dari Inspektorat Jendral KKP. Saat ini guna meningkatkan kualitas pelayanan LPSPL Sorong juga sedang berproses untuk tersertifikasi ISO 37001:2016.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Belum terdapat regulasi turunan terkait pelimpahan pemanfaatan jenis ikan pasca ditetapkannya UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha jenis ikan terancam punah dan apendiks CITES untuk melakukan perdagangan. Permasalahan ini juga menyebabkan terbatasnya peran LPSPL Sorong dalam upaya pengelolaan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES.

Selain itu terdapat permasalahan keterbatasan verifikator pelayanan pemanfaatan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong akibat terbatasnya pegawai LPSPL Sorong sedangkan Jumlah pelaku usaha pemanfaat jenis ikan dilindungi terancam punah dan atau apendiks CITES terus bertambah sehingga menyebabkan penumpukan permohonan penerbitan SAJI dan/atau SR.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terkait regulasi turunan dan kepastian pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah dan atau apendiks CITES yang dikelola KKP dan memastikan

peran KKP terkait Management Authority CITES pasca ditetapkannya UU 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Keterbatasan verifikator jenis ikan dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong dapat ditanggulangi dengan cara melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha jenis ikan dilindungi, terancam punah dan apendiks CITES di wilayah kerja LPSPL Sorong terkait masa berlaku SAJI dan SR yang mencapai 60 hari. Sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dengan jarak waktu pengiriman yang lebih panjang.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 3*

LPSPL Sorong pada triwulan III tahun 2025 melakukan kegiatan pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah, dilindungi dan/atau apendiks CITES, penilaian survei kepuasan Masyarakat dan persiapan pembagian kuota tahap kedua.

Gambar 3.6 Pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah dan/atau apendiks CITES

Jenis ikan yang dilakukan pemanfaatan secara berkelanjutan pada bulan Juli adalah Arwana, Hiu, Pari dan Teripang Pada Juli telah diterbitkan dokumen :

- SAJI DN Hiu dan Pari Apendiks CITES sebanyak 22 dokumen
- SAJI DN Arwana 1 Dokumen
- Surat Rekomendasi DN Hiu, Pari dan Teripang Non Apendiks CITES 35 dokumen.

Total Dokumen perizinan pemanfaatan jenis ikan yang diterbitkan pada Juli adalah 58 Dokumen.

Sementara itu pada bulan Agustus jenis ikan yang dimanfaatkan adalah Arwana, Hiu, Pari dan Teripang. Pada Agustus telah diterbitkan dokumen

- SAJI DN Hiu dan Pari Apendiks CITES sebanyak 117 dokumen
- SAJI DN Arwana 0 Dokumen

- Surat Rekomendasi DN Hiu, Pari dan Teripang Non Apendiks CITES 89 dokumen. Total Dokumen perizinan pemanfaatan jenis ikan yang diterbitkan pada Agustus adalah 206 Dokumen

Bulan September jenis ikan yang dilakukan pemanfaatan adalah Arwana, Hiu, Pari dan Teripang. Pada Juni telah diterbitkan dokumen

- SAJI DN Hiu dan Pari Apendiks CITES sebanyak 60 dokumen
- SAJI DN Arwana 2 Dokumen
- Surat Rekomendasi DN Hiu, Pari dan Teripang Non Apendiks CITES 58 dokumen. Total Dokumen perizinan pemanfaatan jenis ikan yang diterbitkan pada Juni adalah 120 Dokumen

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

Pada triwulan IV tahun 2025 LPSPL Sorong akan melakukan kegiatan pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES serta pembagian kuota pemanfaatan Arwana.

3.4 Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 ini kedalam 1 IK, yaitu IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai).

3.4.1. IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.

Ruang Lingkup:

a. Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);
b. Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;
c. Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI): dan
d. Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Tabel 3.5 IK 6 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)

SK.6	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK.6	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	80	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan III 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa factor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait pelayanan publik dan/atau pelayanan prima sehingga kompetensinya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Selain itu sebagai bentuk evaluasi kualitas layanan secara berkala LPSPL Sorong aktif melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah sehubungan dengan adanya surat instruksi presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan IK dan terdapat blokir PNBP hingga Juni 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran PNBP sempat tertunda.

c. Solusi

Menghadapi tantangan ini LPSPL Sorong berupaya melakukan kegiatan secara daring dan menggunakan form digital sehingga tidak menggunakan banyak biaya.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 4*

Triwulan III LPSPL Sorong telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait kualitas pelayanan public dan diperoleh nilai 96,04. Survei tersebut dilakukan kepada seluruh pengguna jasa LPSPL Sorong dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Dilakukan juga tindak lanjut kegiatan survei kepuasan Masyarakat terkait. Selain itu telah dilakukan kegiatan konsultasi pelayanan publik terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES di wilayah kerja LPSPL Sorong dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Publik LPSPL Sorong di Saumlaki.

Total peserta yang terlibat pada kegiatan Forum Konsultasi Publik di Saumlaki ini adalah 65 orang terbagi menjadi 30 orang luring dan 35 orang daring. Peserta luring terdiri dari 8 orang pengguna jasa/pelaku usaha, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang akademisi, 1 orang LSM, 11 orang pemerintah pusat, 2 orang pemerintah daerah, 4 orang penyelenggara layanan, serta 2 orang media massa.

Perwakilan peserta dari beberapa unsur yang hadir mengutarakan berbagai permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kesulitan untuk menampilkan foto sampel utuh pengajuan produk non sirip;
2. Belum adanya pemahaman jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
3. Belum adanya pemahaman alur pelayanan penerbitan dokumen SAJI dan Surat Rekomendasi

Rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan oleh LPSPL Sorong pasca pertemuan Forum Konsultasi Publik adalah

1. Akan dilakukan peninjauan ulang SOP Verifikasi Lapang
2. LPSPL Sorong akan membuat dan menyebarkan media sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES berupa poster, leaflet, dan media sosialisasi dalam bentuk Softfile

Hasil akhir dari pertemuan ini adalah Peserta yang hadir menyetujui dan sepakat terhadap standar pelayanan LPSPL Sorong tersebut, serta bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik.

Gambar 3.7 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Saumlaki

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

Pada triwulan IV tahun 2025 LPSPL Sorong akan melaksanakan kegiatan penilaian survei Kepuasan Masyarakat, peninjauan ulang SOP pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan/atau apendiks CITES, sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 5 ini kedalam 1 IK yaitu IK Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen).

3.5.1. IK 5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. Target capaian IK ini adalah 1 dokumen.

Tabel 3.6 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.5	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK.5	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	1	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan III tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong yang handal dalam mengolah citra satelit dan data spasial sehingga proses pengerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah adanya blokiir PNBP dan belum terdapat Maksimum Pencairan PNBP hingga triwulan III tahun 2025.

c. Solusi

Mengatasi tantangan ini disarankan agar LPSPL Sorong dapat bersurat ke Sekretarian Jenderal Pengelolaan Kelautan.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 5*

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 adalah identifikasi pemanfaatan Pulau Pulau Kecil di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, Pulau Nusa Ela (Kabupaten Maluku Tengah) Provinsi Maluku, dan Pulau Maitara (Kota Tidore Kepulauan) Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Raja Ampat (Pulau Gam, Kri, Mansuar, Urai)

- **Jenis Pemanfaatan:** Didominasi oleh usaha pariwisata berupa *resort* dan penginapan yang menargetkan wisatawan domestik dan mancanegara.
- **Status Kepemilikan Modal:** Terdapat variasi antara Penanaman Modal Asing (PMA) seperti pada Kri Eco Resort dan Sorido Bay, serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti pada Yenatar Resort dan Raja Ampat Dive Lodge.
- **Aspek Perizinan:** Sebagian besar pelaku usaha **sudah memiliki Izin Lokasi/KKPR** (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), namun **belum ada yang memiliki KKPRL** (di perairan). Ini menjadi catatan penting terkait legalitas pemanfaatan ruang laut di sekitar usaha mereka.
- **Dampak Ekonomi dan Sosial:** Para pelaku usaha umumnya memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dengan standar upah minimum. Selain itu, banyak *resort* yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat sekitar melalui program pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Unsur kearifan lokal juga banyak diadaptasi dalam desain bangunan dan atraksi budaya untuk menyambut tamu.
- **Aspek Ekologi:** Kondisi ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan mangrove di sekitar lokasi usaha, terpantau dalam kondisi baik. Beberapa *resort* bahkan memiliki afiliasi atau program konservasi mandiri.

Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan

- **Jenis Pemanfaatan:** Fokus pada pariwisata pantai dan ekowisata mangrove yang dikelola oleh berbagai pihak, mulai dari Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan hingga Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- **Status Kepemilikan Modal:** Seluruh usaha merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- **Aspek Perizinan:** Dari empat lokasi yang didata, dua di antaranya (Pantai Seribu Impian dan Desa Wisata Akebay) telah memiliki izin lokasi KKPR. Untuk izin lingkungan (AMDAL), sedang dalam proses pengajuan untuk keseluruhan Pulau Maitara. Dua lokasi lainnya belum memiliki izin.
- **Dampak Ekonomi dan Sosial:** Pemanfaatan untuk pariwisata memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal, baik melalui retribusi yang masuk ke kas desa maupun peningkatan pendapatan dari jasa transportasi (bentor). Selain itu, sering diadakan pelatihan bagi masyarakat terkait pengelolaan sampah dan konservasi. Area wisata juga menjadi lokasi pelaksanaan ritual adat **"Salai Jin"** dan **Festival Akebay** tahunan.
- **Isu Lingkungan:** Ditemukan adanya masalah abrasi dan penumpukan sedimen pasir di salah satu lokasi pantai wisata, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan mitigasi ke depan.

Pulau Nusa Ela, Kabupaten Maluku Tengah

- **Jenis Pemanfaatan:** Pemanfaatan di pulau ini lebih beragam, mencakup pariwisata komersial (Nusa Ela Resort), hunian privat (villa), dan permukiman tradisional masyarakat Dusun Nusa Ela yang telah berlangsung turun-temurun.
- **Status Kepemilikan Modal:** Usaha resort dimiliki oleh pihak eksternal (warga Kota Ambon), sedangkan villa dimiliki oleh warga lokal.
- **Aspek Perizinan dan Hak Ulayat:** Pemanfaatan komersial sangat bergantung pada **izin dari pemangku hak ulayat (Negeri Ureng)**. Pengelola resort beroperasi atas dasar izin adat ini dan belum memiliki perizinan formal seperti NIB atau sertifikat tanah, dengan asumsi bahwa tanah ulayat tidak dapat disertifikatkan. Namun, pemilik menyatakan bersedia mengurus perizinan formal jika diwajibkan.

- **Dampak Ekonomi:** Keberadaan resort memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Dusun Nusa Ela, yang menjual hasil tangkapan laut dan kebun kepada tamu serta dilibatkan dalam pekerjaan di *resort*.
- **Infrastruktur dan Tantangan:** Pulau ini telah memiliki infrastruktur dasar seperti PLTS, PLTD, dan sekolah dasar. Namun, terdapat tantangan seperti kondisi mercusuar yang rusak, keterbatasan transportasi, dan kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang hospitalitas.

Berdasarkan hasil identifikasi diketiga Lokasi dapat diketahui bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil di ketiga lokasi sangat didominasi oleh sektor pariwisata, yang menunjukkan potensi ekonomi besar dari keindahan bahari. Terdapat kesenjangan yang signifikan terkait kepemilikan izin formal. Di Raja Ampat, tantangannya adalah pemenuhan izin KKPRL. Di Maitara, sebagian usaha belum berizin. Sementara di Nusa Ela, pemanfaatan masih sangat bergantung pada legalitas adat dan belum tersentuh perizinan formal pemerintah. Di semua lokasi, pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan operasional usaha. Kearifan lokal, baik dalam bentuk arsitektur, ritual budaya, maupun hak ulayat, memegang peranan penting dalam dinamika pemanfaatan pulau. Secara umum, pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pariwisata terbukti memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha turunan.

Gambar 3.8 Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil di Wilker LPSPL Sorong

5. *Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025*

Rencana aksi triwulan IV tahun 2025 untuk mendukung IK ini adalah melakukan identifikasi pemanfaatan pulau pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

3.6 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 4 ini kedalam 1 IKU, yaitu IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen).

3.6.1. IK 6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

Kegiatan verifikasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

a. Melakukan penilaian teknis terhadap permohonan KKPRL yang masuk melalui OSS dan/atau aplikasi e-Sea
b. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut berupa identifikasi pengendalian dan penilaian kepatuhan KKPRL
c. Mengetahui potensi dari PNBP;

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi pemanfaatan ruang laut. Target capaian IK ini adalah 2 Dokumen yang terdiri dari dokumen Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.

Tabel 3.7 Capaian IKU 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.6	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK.6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	2	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan III Tahun 2025***

   Capaian IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan III 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan III tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   d. **Analisis Keberhasilan**

   Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan KKPRL sehingga kompetensinya menunjang pelaksanaan kegiatan, koordinasi aktif dengan dengan Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, serta Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

   e. **Analisis Kegagalan/Kendala**

   Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah sehubungan dengan adanya surat instruksi presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan IK.

   f. **Solusi**

   Menghadapi tantangan ini LPSPL Sorong berupaya melakukan kegiatan secara daring, namun terdapat tantangan lain yaitu detail informasi yang diperoleh hanya berdasar pada proses wawancara tanpa ada peninjauan lapangan, oleh karena itu disarankan agar dibuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan monitoring atau pengendalian secara daring untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap memenuhi standar informasi yang diperlukan.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 4*

Hingga triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong telah melaksanakan kegiatan pendukung seperti :

1. Penilaian teknis KKPRL resiko rendah diwilayah kerja LPSPL Sorong sebanyak 65 permohonan, Provinsi Maluku memiliki permohonan sebanyak 15, Maluku Utara sebanyak 20, Papua Barat sebanyak 13, Papua sebanyak 8, Papua Selatan sebanyak 1, Papua Tengah sebanyak 3, Papua Barat Daya sejumlah 4 dan terdapat satu permohonan lintas provinsi sebanyak 1 permohonan. Jumlah pemohon yang mengajukan penilaian teknis KKPRL hingga TW III tahun 2025 adalah 50 pemohon
2. Pengendalian KKPRL di wilayah kerja LPSPL Sorong sebanyak 13 kali
3. Asistensi Pengurusan dokumen KKPRL

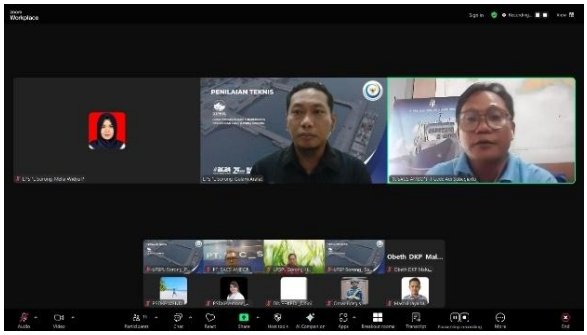

Gambar 3.9 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung IK 4

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

Pada triwulan IV tahun 2025 LPSPL Sorong akan melaksanakn kegiatan penilaian teknis KKPRL resiko rendah dan identifikasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah kerja LPSPL Sorong.

3.7 Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong, maka LPSPL Sorong menjabarkan dalam 11 IK, yaitu (i) IK 6 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (ii) IK 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (iii) IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (iv) IK 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), (v) IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) (vi) IK 11 nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%), (vii) IK 12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%), (viiii) IK 13 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai) (ix) IK 14 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (x) IK 15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%), (xi) IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai).

3.7.1. IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

a. perencanaan kinerja (30%);
b. pengukuran kinerja (30%);
c. pelaporan kinerja (15%); dan
d. evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL sesuai dengan kategori (Tabel 3.8)

Tabel 3.8 Kategori nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelolan dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.9 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IK 7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	88	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan III Tahun 2025***

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan III tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   Keberhasilan diupayakan melalui kelengkapan dokumen dan setiap perubahan diikuti dengan perubahan dokumen perencanaan maupun dokumen monitoring evaluasi. Penyesuaian dokumen tersebut disesuaikan untuk menjamin akuntabilitas kinerja LPSPL Sorong.

   b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

   Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat kendala dalam progress pencapaian indikator kinerja ini, karena semua dokumen telah dipenuhi.

   c. **Solusi**

   Pada triwulan III tahun 2025 belum terdapat kendala sehingga belum terdapat solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut.

4. ***Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 7***

LPSPL Sorong melakukan pemenuhan dokumen pendukung PM SAKIP diantaranya Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Triwulan III serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui surat Nomor B.1091/LPSPL.1/TU.140/X/2025 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 17 Oktober 2025. Selain itu dilakukan juga evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong secara berkala disetiap bulan melalui rapat bulanan.

Gambar 3.10 Dokumentasi pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong setiap bulan

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

Pada triwulan III akan dilaksanakan verifikasi data capaian kinerja triwulan IV tahun 2025, penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dan melakukan monitoring evaluasi bulanan.

3.7.2. IK 8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator tersebut antara lain Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Cara hitung IK ini menggunakan rumus

$$\sum_{n=1}^{7} (Nilai\ Indikator_n \times\ Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikaItor yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 3.10 Bobot Penilaian IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 3.11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong						
IKU.8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	83	-	-	-	-	89	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya semesteran sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian. Nilai IKPA LPSPL Sorong berdasarkan aplikasi OMSPAN sampai dengan September 2025 ada 82,11.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya semesteran sehingga capaian triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   LPSPL Sorong memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran melalui pelaksanaan revisi DIPA; menjaga kualitas pelaksanaan anggaran melalui monitoring penyerapan anggaran setiap bulan, belanja kontraktual,

penyelesaian tagihan, pengelolaan UP-TUP dan dispensasi SPM serta berusaha meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memaksimalkan capaian output. LPSPL Sorong secara rutin melakukan monitoring capaian output dengan perencanaan dan realisasi anggaran setiap bulannya melalui rapat bulanan.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya penundaan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dari PLN hingga Juni 2025 berdasarkan surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project dan selain itu terdapat blokir penggunaan PNBP hingga Juni 2025 serta hingga akhir Triwulan II tidak terdapat MP PNBP. Hal ini mengakibatkan proses penyerapan anggaran tertunda. Oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA. Kendala TW III lainnya dalam pencapaian target nilai IKPA adalah ketidaktepatan waktu dalam pengelolaan UP/TUP, karena sempat terkendala pada proses TTE pada aplikasi SAKTI, sehingga penyelesaian pengeloaan UP/TUP tertunda beberapa hari dan tanggal jatuh tempo.

c. Solusi

LPSPL Sorong melakukan monitoring IKPA secara mingguan untuk memberikan informasi kepada seluruh pegawai LPSPL Sorong terkait deviasi belanja sehingga dapat dijadikan acuan pada perencanaan kegiatan periode berikutnya. Mengatasi tantangan deviasi halaman III DIPA disarankan untuk melakukan revisi halaman III DIPA secara periodik. LPSPL Selain itu LPSPL Sorong juga berkomitmen dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan serta tidak terlambat dalam pertanggungjawaban UP TUP.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 7*

LPSPL Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi OMSPAN dan Monitoring IKPA secara mingguan. Selain itu secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan.

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

Pada triwulan IV akan dilakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, melakukan revisi POK dan halaman III DIPA untuk acuan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.

3.7.3. IK 9 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DJPKRL LINGKUP LPSPL SORONG (NILAI)

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
2. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
3. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
4. Variabel Efisiensi;

2. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

1. Penggunaan SBK; dan/atau
2. Efisiensi SBK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan meliputi :

1. Manual indikator kinerja sasaran strategis

Pengisian manual indikator kinerja sasaran strategis dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga. Pengisian manual indikator dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja sasaran strategis, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja sasaran strategis, antara lain:

1. Definisi indikator kinerja sasaran strategis;
2. Formula perhitungan capaian indikator;
3. Tujuan;
4. Tingkat kendali;
5. Tingkat validitas indikator;
6. Polarisasi capaian;
7. Instansi penyedia data;
8. Sumber/aplikasi/media data;
9. Waktu data tersedia;
10. Periode pelaporan; dan/atau
11. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

2. Manual indikator kinerja program

Pengisian manual indikator kinerja program dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja program, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja program, antara lain:

1. Definisi indikator kinerja program;
2. Formula perhitungan capaian indikator;
3. Tujuan;
4. Tingkat kendali;
5. Tingkat validitas indikator;
6. Polarisasi capaian;
7. Instansi penyedia data;

8. Sumber/aplikasi/media data;
9. Waktu data tersedia;
10. Periode pelaporan; dan/atau
11. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

3. Manual RO berdasarkan referensi yang telah disediakan

Pengisian manual RO dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Pengisianmanual RO dilakukan sejak awal tahun anggaran sebagai prasyaratpelaporan capaian RO tahun anggaran berjalan. Manual RO dapatdiperbarui apabila terdapat perubahan nomenklatur RO, perubahansatuan atau penambahan RO baru. Adapun referensi manual ROantara lain:

1. Statis/dinamis;
2. Cara pelaporan;
3. Polarisasi capaian; dan/atau
4. Polarisasi waktu.

Pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran merupakan proses untuk menghasilan nilai capaian setiap indikator. Pedoman ini akan mengatur pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran sebagai berikut:

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

Efektivitas

Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:
CRO : Capaian RO tingkat Satker
$RVRO_i$: Realisasi Volume RO i
$TVRO_i$: Target Volume RO i
n : Jumlah RO

Efisiensi

Penggunaan SBK Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang

telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan\ SBK = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum ROSBKU}{\sum RO\ SBKK\ dalam\ PMK + \sum RO\ memenuhi\ kriteria\ SBKU}\right) \times 100\%$$

PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{Indeks\ SBK_i - \ Indeks\ RA\ SBK_i}{Indeks\ SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:
ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja
Indeks RA SBKi : Indeks Realisasi RO i SBK
n : Jumlah RO SBK

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan
NESBK : Nilai Efisiensi SBK
ESBK : Efisiensi SBK

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

Tabel 3.12 Tabel Bobot Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:
NKA Satker = (CRO x WCRO) + (PenggunaanSBK x WPenggunaanSBK) + (NEAlokasi x WEAlokasi)

Keterangan
NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker
CRO : Capaian RO
PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi
WCRO : Bobot Capaian RO
WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Untuk mempermudah interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran, nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam

kategori sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (Sembilan puluh).
2. Kategori Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh).
3. Kategori Cukup, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh).
4. Kategori Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (limapuluh) sampai dengan 60 (enam puluh).
5. Kategori Sangat Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh)

Tabel 3.13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup Lpspl Sorong (Nilai)

SK.7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
IKU.9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Djpkrl Lingkup Lpspl Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	71,5	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. ***Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)***

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

Periode pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah tahunan sehingga triwulan III tahun 2024 dan triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   LPSPL Sorong secara rutin mengontrol realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengisi secara bertahap capaian pada aplikasi SAKTI. SDM LPSPL Sorong juga telah mengikuti bimbingan teknis terkait mengelola aplikasi SMART DJA. Selain itu setiap triwulan LPSPL melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA untuk meningkatkan nilai pelaksanaan anggaran.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya surat instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang entang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja. Selain itu terdapat pendunaan pencairan anggaran kegiatan yang bersumber dari PLN untuk project Lautra hingga Juni 2025 berdasarkan surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project dan selain itu terdapat blokir penggunaan PNBP hingga Juni 2025 serta hingga akhir Triwulan II tidak terdapat MP PNBP. Hal ini mengakibatkan proses penyerapan anggaran tertunda. Oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA dan pemantauan DIPA secara berkala untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 9*

LPSPL Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi DJA SMART. Secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan.

5. *Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025*

Pada triwulan IV akan dilakukan penginputan capaian rincian output pada aplikasi SAKTI dan melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA.

3.7.4. IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan

DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan I Tahun 2025. Cara penghitungan Indikator kinerja ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.14 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
IKU.10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Djpkrl Lingkup Lpspl Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
3	3	3	3	100%	-	4	3

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Indeks Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan III Tahun 2025***

Indikator kinerja ini pada triwulan III tahun 2025 telah tercapai 3 dokumen atau capaiannya 100% yaitu dokumen SPIP triwulan IV tahun 2024, SPIP triwulan I tahun 2025 dan SPIP triwulan II tahun 2025. Capaian ini telah disampaikan ke Direktur Jenderal PRL dengan surat nomor: B.32/LPSPL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian SPIP Triwulan IV Tahun 2024, surat nomor B.377/LPSPL.1/TU.140/IV/2025 tanggal 15 April 2025 April perihal penyampaian SPIP Triwulan I Tahun 2025 dan surat nomor B.667/LPSPL.1/TU.140/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 Perihal Penyampaian Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 di Lingkup LPSPL Sorong. Sementara itu pada triwulan III LPSPL Sorong juga telah menyelesaikan laporan SPIP triwulan III dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Pengemelalui surat nomor B.1063/LPSPL.1/TU.140/X/2025.

Gambar 3.11 Tangkapan Layar Laporan SPIP TW IV tahun 2024, SPIP TW I Tahun 2025 dan SPIP TW II Tahun 2025

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

Capaian Indeks Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) triwulan III tahun 2025 adalah 3 dokumen dan capaian IK ini pada triwulan III tahun 2024 adalah 3 dokumen sehingga capaian kinerja triwulan III tahun 2024 dan 2025 adalah sama.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

a. **Analisis Keberhasilan**

LPSPL Sorong melakukan penyusunan laporan SPIP secara rutin bulanan dan triwulanan sehingga selalu tersedia data dan informasi pengendalian terupdate. Selain itu pemenuhan dokumen SPIP terupdate didukung adanya kerjasama dari SDM sesuai tusinya masing-masing.

b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada kerjasama dan komitmen SDM untuk selalu menyediakan data dan informasi organisasi terupdate untuk kebutuhan pengendalian.

c. Solusi

Untuk menghindari kegagalan dalam menyusun dokumen SPIP, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dari beberapa pegawai yang memiliki tusi terkait penyusunan dokumen SPIP.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 9*

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja ini pada triwulan III adalah penyusunan laporan SPIP TW II Tahun 2025.

5. *Rencana Aksi Triwulan IV TA 2025*

Pada triwulan IV tahun 2025 akan dilakukan penyusunan SPIP triwulan IV tahun 2025 dan SPIP rutin bulanan.

3.7.5. IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penghitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan cara

$$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$

$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$

$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$

$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$

IP = Indeks Profesionalisme

IPi = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} * R_{2k} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W_{3l} * R_{3l} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} * R_{4m} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 3.15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	83	-	-	-	-	80	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) Tahun 2025***

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya semesteran sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian. Berdasarkan tautan IP ASN pada http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon bahwa indeks profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong sampai dengan triwulan III yaitu 85,17.

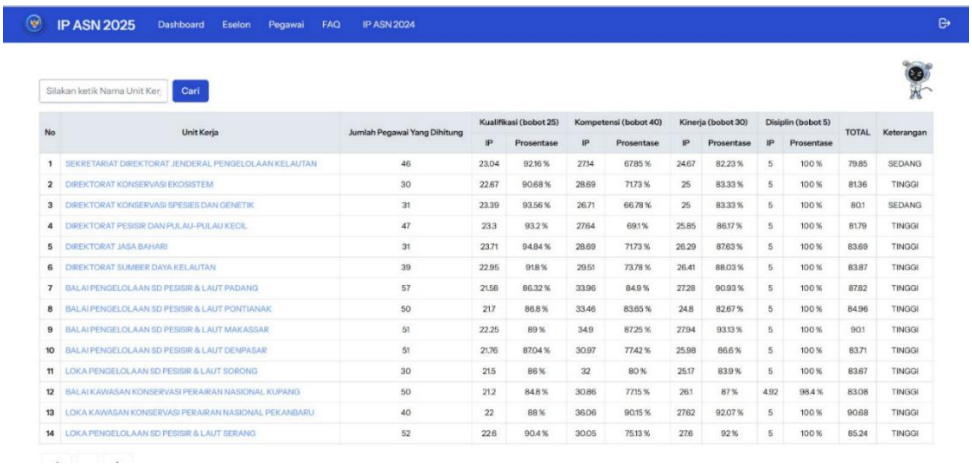
IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Ker Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	46	23.04	92.16 %	27.14	67.85 %	24.67	82.23 %	5	100 %	79.85	SEDANG
2	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	30	22.67	90.68 %	28.69	71.73 %	25	83.33 %	5	100 %	81.36	TINGGI
3	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	31	23.39	93.56 %	26.71	66.78 %	25	83.33 %	5	100 %	80.1	SEDANG
4	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	47	23.3	93.2 %	27.64	69.1 %	25.85	86.17 %	5	100 %	81.79	TINGGI
5	DIREKTORAT JASA BAHARI	31	23.71	94.84 %	28.69	71.73 %	26.29	87.63 %	5	100 %	83.69	TINGGI
6	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	39	22.95	91.8 %	29.51	73.78 %	26.41	88.03 %	5	100 %	83.87	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	57	21.58	86.32 %	33.96	84.9 %	27.28	90.93 %	5	100 %	87.82	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	50	21.7	86.8 %	33.46	83.65 %	24.8	82.67 %	5	100 %	84.96	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	51	22.25	89 %	34.9	87.25 %	27.94	93.13 %	5	100 %	90.1	TINGGI
10	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	51	21.76	87.04 %	30.97	77.42 %	25.98	86.6 %	5	100 %	83.71	TINGGI
11	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	30	21.5	86 %	32	80 %	25.17	83.9 %	5	100 %	83.67	TINGGI
12	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	50	21.2	84.8 %	30.86	77.15 %	26.1	87 %	4.92	98.4 %	83.08	TINGGI
13	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	40	22	88 %	36.06	90.15 %	27.62	92.07 %	5	100 %	90.68	TINGGI
14	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	52	22.6	90.4 %	30.05	75.13 %	27.6	92 %	5	100 %	85.24	TINGGI

Gambar Gambar 3.12 *Screenshot* Penilaian IP ASN Triwulan III tahun 2025
Sumber : http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

Periode pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah semesteran sehingga triwulan III tahun 2024 dan triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

a. **Analisis Keberhasilan**

1. Kualifikasi: tingkat Pendidikan ASN LPSPL Sorong meningkat setiap tahunnya melalui tugas belajar maupun ijin belajar.
2. Kompetensi: masing-masing ASN LPSPL Sorong memiliki kompetensi beranekaragam yang didapatkan dari Bimtek/Webinar/Workshop/ Seminar/Diklat. Kompetensi tersebut diakui dengan penerbitan sertifikat atas kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti dengan minimal pembelajaran 20 jam pembelajaran (JP).
3. Kinerja: pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP) secara individu sudah menggunakan SKP online, sehingga sudah ada rincian target kinerja yang harus dicapai masing-masing individu dalam jangka waktu tertentu.
4. Disiplin: tingkat kehadiran individu telah di monitoring secara berkala oleh kepegawaian sehingga meningkatkan nilai pada indikator ini.

b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

Tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator ini, namun pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis/workshop/seminar ada yang belum mengupdate sertifikatnya pada MyASN.

c. **Solusi**

Kepegawaian LPSPL Sorong melakukan monitoring secara berkala dan memberikan himbauan kepada pegawai LPSPL Sorong untuk update data peningkatan kapasitas di MyASN.

4. ***Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 10***

Kegiatan pendukung pelaksanaan Indikator Kinerja ini adalah pegawai LPSPL Sorong telah mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek dan/atau seminar serta mengunggah data dukungnya di portal MyASN, pengusulan pencantuman gelar dan penilaian kinerja pegawai.

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV TA 2025***

Pada triwulan IV tahun 2025, pegawai LPSPL Sorong secara mandiri maupun ditugaskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis/seminar/workshop. Serta melakukan penginputan sertifikat kompetensi pelatihan secara mandiri oleh masing-masing pegawai untuk mendukung IP ASN pada dimensi kompetensi. Bagian kepegawaian akan melakukan monitoring secara berkala melalui WA grup bagi pegawai yang belum menginput data sertifikat pada e-pegawai. Masing-masing pegawai akan mulai mengupload Sertifikat Pelatihan Bimtek/Seminar/Workshop pada aplikasi MyASN dan pengisian arsip sertifikat secara mandiri pada gdrive yang disiapkan oleh bagian kepegawaian. Kepegawaian LPSPL Sorong juga melakukan share informasi terkait kegiatan bimtek maupun seminar.

3.7.6. IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 atau Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LPSPL Sorong. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\frac{Jumlah\ rekomendasi\ Itjen\ yang\ telah\ tuntas\ ditindaklnjuti\ LPSPL\ Sorong}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ LPSPL\ Sorong} \times 100$$

Tabel 3.16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
100	85	95	100	105,26%	-	95	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) Tahun 2025***

Berdasarkan laman SIDAK yang dikelola Inspektorat Jenderal KKP (http://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/6/216) dan surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor: B.108/ITJ.1/HP.510/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal s.d Triwulan I Tahun 2025 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan, LPSPL Sorong telah menindaklanjuti 3 dari 3 rekomendasi sehingga capaian IK persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Triwulan I Tahun 2025 adalah 100%. Hal ini juga didukung oleh surat penyampaian Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B. 2556/DJPK.1/TU.210/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK Triwulan III Tahun 2025" nilai capaian LPSPL Sorong untuk Indikator kinerja ini adalah 100%. Persentase capaian TW III terhadap target TW III sebesar 105,26%.

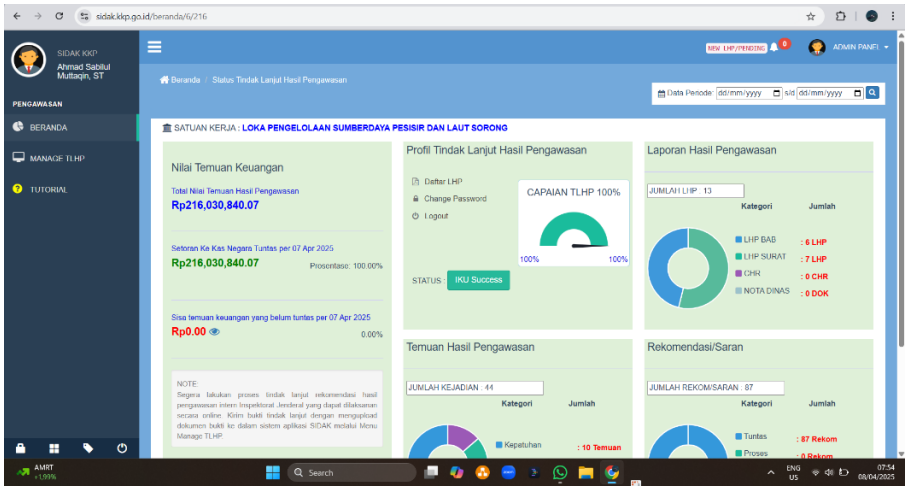

Gambar 3.13 Screenshot aplikasi SIDAK KKP
Sumber : sidak.kkp.go.id tanggal 1 Oktober2025

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan 2025 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun triwulan III tahun 2024 yaitu 80 sedangkan pada triwulan III tahun 2025 yaitu 95. Capaian pada pada triwulan III tahun 2024 dan triwulan III tahun 2025 yaitu sama pada nilai 100%.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   LPSPL Sorong selalu memonitoring secara rutin/berkala semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen sehingga selalu ada progress tindaklanjut pada aplikasi SIDAK. Setiap pegawai yang terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing dengan fungsi kontrol dari Kepala LPSPL Sorong.

   b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

   Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada koordinasi dan komitmen organisasi untuk memperbaiki kinerja organisasi berdasarkan rekomendasi yang telah ada.

   c. **Solusi**

   Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala yang menyebabkan kegagalan. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir kegagalan agar dilakukan koordinasi antar pegawai dalam menyelesaikan rekomendasi yang ada.

4. ***Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 11***

   LPSPL Sorong telah melakukan pemantauan aplikasi SIDAK untuk memperhatikan hasil pengawasan Itjen KKP.

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV TA 2025***

   Pada triwulan IV tahun 2025, LPSPL Sorong melakukan monitoring aplikasi SIDAK secara berkala, serta akan menindaklanjuti jika terdapat rekomendasi yang terbit pada triwulan IV tahun 2025.

3.7.7. IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

Temuan LHP BPK LPSPL Sorong yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK LPSPL Sorong Tahun 2025. Cara menghitung IK ini dilakukan dengan rumus

$$\frac{\textbf{\textit{Jumlah Temuan LHP BPK LPSPL Sorong yang diselesaikan}}}{\textbf{\textit{Jumlah temuan dalam LHP BPK}}\ \textbf{LPSPL Sorong}}\ \textbf{\textit{x}}\ \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target.**

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100.

Tabel 3.17 Capaian IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IK.13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	100	-	-	-	-	100	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%) Triwulan I Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja triwulan III tahun 2024 dengan triwulan III tahun 2025.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**.

   LPSPL Sorong segera menindaklanjuti permintaan dokumen dan menyelesaikan temuan dari BPK. Segala tindaklanjut yang dilaksanakan LPSPL Sorong disampaikan secara resmi dan berjenjang.

   b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

   Pada triwulan III tahun 2025 belum terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini, namun kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila organisasi tidak kooperatif menindaklanjuti temuan BPK.

   c. **Solusi**

   Belum terdapat solusi karena tidak terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

4. ***Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 12***

LPSPL Sorong mengikuti pelaksanana pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan kegiatan Ocean Prosperity Project yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

LPSPL akan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan BPK jika terdapat hasil pemeriksaan pada triwulan IV tahun 2025.

3.7.8. IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Cara perhitungan indikator ini adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 3.49 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	75	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. ***Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja triwulan III tahun 2024 dengan triwulan III tahun 2025.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   LPSPL Sorong memiliki 6 (enam) kelompok kerja yang tertuang pada surat tugas Kepala LPSPL Sorong Nomor: SP.70/LPSPL.1/TU.110/II/2025, yang selalu memonitor pelaksanaan kinerja organisasi dalam rangka mencapai predikat WBK sehingga masing-masing komponen penilaian dapat dimonitoring kemajuannya.

   b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

   Kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada dokumen terkait proses terbentuknya predikat WBK di organisasi LPSPL Sorong, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang setiap tahapannya harus didokumentasikan dan diarsipkan. Jumlah SDM LPSPL Sorong yang setiap tahunnya berkurang juga membuat tidak maksimalnya pencapaian nilai WBK.

   c. **Solusi**

   LPSPL Sorong melakukan pertemuan setiap minggu pada hari rabu dengan seluruh pegawai untuk monitoring status kelengkapan dokumen WBK, sekretaris pembangunan zona integritas memantau dan menghimbau agar setiap kelompok kerja melengkapi dokumen yang belum tersedia, serta mengupdate persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 13

Triwulan III Tahun 2025, LPSPL Sorong melakukan monitoring mingguan pembangunan WBK lingkup LPSPL Sorong, pemenuhan dokumen WBK WBBM dan monitoring evaluasi Pembangunan WBK.

5. *Rencana Aksi Triwulan III TA 2025*

Pada triwulan III tahun 2025 akan akan dilaksanakan pemenuhan dokumen secara berkala, monitoring kelengkapan dokumen dan menyampaikan persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload.

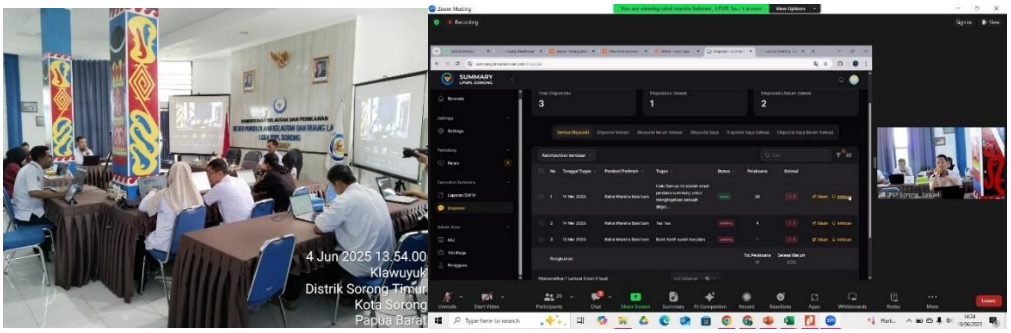

Gambar 3.14 Rapat Mingguan Pembangunan WBK WBBM Lingkup LPSPL Sorong

3.7.9. IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

a. Pengawasan system kearsipan internal
   - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
   - Sumber daya kearsipan yang meliputi

b. Pengawasan pengelolaan arsip aktif

   Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

c. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Formula perhitungan Indikator Ini antara lain

1. Nilai pengawasan kearsipan internal LPSPL Sorong akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal LPSPL Sorong merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
   a. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
      - Penciptaan Arsip
      - Penggunaan Arsip
      - Pemeliharaan Arsip
      - Penyusutan Arsip

      i. Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

   b. Aspek sumberdaya kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
      - Sumberdaya Manusia Kearsipan
      - Sarana dan Prasarana Kearsipan

      Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadapa Objek Pengawasan berupa:

Kategori	Interval Skor	
AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
A	Memuaskan	> 80 – 90
BB	Sangat Baik	> 70 – 80
B	Baik	> 60 – 70
CC	Cukup	> 50 – 60
C	Kurang	> 30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Tabel 3.18 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	80	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. ***Capaian IK* Nilai *pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan III Tahun 2025***

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian. LPSPL Sorong telah melakukan penilaia internal kearsipan pada triwulan III dan memperoleh nilai 88.55 dengan kategori A (Memuaskan).

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB - ASPEK	NILAI SUB - ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	2.200,00			95,42	0,70	66,80
	1.1 SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP	700,00	640,00	0,20	18,29		
	1.2 SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP	200,00	200,00	0,20	20,00		
	1.3 SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP	1.100,00	1.010,00	0,35	32,14		
	1.4 SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP	200,00	200,00	0,25	25,00		
2	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	300,00			72,50	0,30	21,75
	2.1 SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	200,00	90,00	0,50	22,50		
	2.2 SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	100,00	100,00	0,50	50,00		
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR						1,00	88,55
KATEGORI NILAI AKHIR				A (MEMUASKAN)			

Gambar 3.15 Hasil Penilaian Kearsipan Internal LPSPL Sorong

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2024 dan triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   LPSPL Sorong melakukan telaah terhadap lembar kerja evaluasi (LKE) untuk penilaian indikator kinerja ini serta memenuhi hal-hal yang digunakan untuk menjawab lembar kerja evaluasi tersebut.

   b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

   Pada triwulan III tahun 2025 belum terdapat kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini.

   c. **Solusi**

   Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala pencapaian indikator ini.

4. ***Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 15***

   Triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong telah melaksanakan Rapat Pembahasan Pengisian Peta Jabatan Fungsional Arsiparis, Rapat Koordinasi Monitoring Persuratan dan Kearsipan pada Aplikasi Portal Arsiparis (Dalam Jaringan), Asistensi Persiapan Penilaian Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup UPT, Identifikasi dan Inventarisasi Arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Publikasi Jaringan Informasi Kearsipan serta penilaian internal kearsipan LPSPL Sorong.

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

   Pada triwulan IV tahun 2025 akan melaksanakan evaluasi pengarsipan tahun 2024, penyusunan target kearsipan tahun 2025, penataan arsip arsip aktif di unit pengolah dan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi portal.

3.7.10. IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya. Formula perhitungan capaian indikator ini adalah

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 3.19 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	76	100	120	-	76	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK* Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) Triwulan III *Tahun 2025***

Indikator kinerja ini memiliki capaian 100% pada triwulan III. Total Pagu pada kertas kerja klarifikasi LPSPL Sorong sebesar Rp26.230.290.000 dengan rekap RUP terumumkan pada aplikasi SIRUP pagu yang terumumkan sebesar Rp26.230.290.000 sesuai dengan surat penyampaian sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang

Diumumkan pada SIRUP Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dan nota dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 Tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN TW-3			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP) TW3			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
G	*Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut*	*89,119,323,985*	*-*	*89,119,323,985*	*89,119,323,985*	*-*	*89,119,323,985*	*-*	*100.00%*
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	26,318,377,000		**26,318,377,000**	26,318,377,000		**26,318,377,000**	-	**100.00%**
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	2,914,499,000		**2,914,499,000**	2,914,499,000		**2,914,499,000**	-	**100.00%**
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	5,826,547,000		**5,826,547,000**	5,826,547,000		**5,826,547,000**	-	**100.00%**
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,206,467,000		**19,206,467,000**	19,206,467,000		**19,206,467,000**	-	**100.00%**
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,343,328,000		**2,343,328,000**	2,343,328,000		**2,343,328,000**	-	**100.00%**
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	3,217,528,985		**3,217,528,985**	3,217,528,985		**3,217,528,985**	-	**100.00%**
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	3,062,287,000		**3,062,287,000**	3,062,287,000		**3,062,287,000**	-	**100.00%**
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	26,230,290,000		**26,230,290,000**	26,230,290,000		**26,230,290,000**	-	**100.00%**
9	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	941,754,537,201	50,284,466,000	**992,039,003,201**	941,754,537,201	50,284,466,000	**992,039,003,201**	-	**100.00%**

Gambar 3.16 Tangkapan layar persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III tahun anggaran 2025

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

Indikator ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan III tahun 2024.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

a. **Analisis Keberhasilan**

LPSPL Sorong melakukan memiliki pegawai yang bersertifikat PBJ dan telah memahami penggunakan aplikasi SIRUP selain itu LPSPL Sorong juga memiliki hubungan yang baik dengan Pejabat Pengadaan eksternal sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya surat instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang entang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja. Selain itu terdapat Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan

Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*. Sehingga proses pengadaan tertunda.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat berkonsultasi dengan Setdijen DJPKRL terkait kondisi anggaran yang dapat digunakan dan melakukan percepatan proses pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja ini.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 15*

Triwulan III LPSPL Sorong melaksanakan proses rekrutmen konsultan individu pendukung program Lautra

5. *Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025*

Pada triwulan IV tahun 2025 LPSPL Sorong akan melaksanakan penyusunan RUP dan Kertas Kerja pengadaan.

3.7.11. IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) adalah hasil evaluasi Terhadap Pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup LPSPL Sorong yang menggambarkan nilai Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Komunikasi dengan Media dan Lembaga yang Optimal di Lingkup LPSPL Sorong.

Formula perhitungan indikator ini adalah Nilai diperoleh dari hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan formula perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun nilai keterbukaan informasi publik dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal lingkup LPSPL Sorong sesuai dengan kriteria:

a. informatif dengan nilai 97-100;
b. menuju informatif dengan nilai 80-96;
c. cukup informatif dengan nilai 60-79;
d. kurang informatif dengan nilai 40-59;
e. tidak informatif dengan nilai <39.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan masing-masing aspek memiliki sub-nilai yang berkontribusi terhadap

total nilai keseluruhan. Bobot penilaian ditentukan berdasarkan persentase capaian dari masing-masing aspek, yang kemudian dihitung untuk memperoleh hasil akhir. Evaluasi difokuskan pada relevansi, akurasi, dan kekinian informasi yang dipublikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Setiap jawaban dalam kuesioner harus didukung dengan bukti pelaksanaan, yang dapat berupa tautan website, dokumen digital, atau soft file. Apabila terdapat aspek yang tidak relevan atau tidak tersedia, maka unit organisasi wajib memberikan keterangan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi akan berakibat pada pengurangan nilai.

Tabel 3.20 Bobot Penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

<table>
<tr><th>NO</th><th>ASPEK YANG DINILAI</th><th>SUB NILAI</th><th>PERSENTASI</th><th>TOTAL</th><th>BOBOT</th><th>HASIL</th></tr>
<tr><th colspan="7">TABULASI NILAI SAQ (Self Assessment Questionare)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mengumumkan Informasi public</td><td>15</td><td rowspan="3">60%</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="5">80%</td><td rowspan="5">80</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Menyediakan Dokumen Informasi</td><td>25</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sarana Prasarana</td><td>30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kelembagaan</td><td>20</td><td rowspan="2">40%</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Digitalisasi</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>100</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="7">TABULASI NILAI PRESENTASI UJI INFORMASI PUBLIK</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persentasi Publik</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">TOTAL NILAI KESELURUHAN</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
</table>

Bobot penilaian dalam keterbukaan informasi publik dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu hasil pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) sebesar 80% dan presentasi informasi publik sebesar 20%. Penilaian dalam SAQ dilakukan dengan menilai lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan total sub-nilai 100. Persentase capaian dari masing-masing aspek dihitung untuk menentukan skor akhir, yang kemudian dikalikan dengan bobot 80%. Dalam contoh tabel, persentase ketercapaian adalah 60% untuk sebagian aspek dan 40% untuk aspek lainnya, menghasilkan nilai total 100. Bobot akhir dari pengisian SAQ sebesar 80% memberikan nilai 80. Selanjutnya, 20% sisanya diperoleh dari aspek presentasi informasi publik, sehingga total nilai keterbukaan informasi publik mencapai 100%. Dengan metode ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, memastikan keseimbangan antara pengisian kuesioner dan kemampuan unit organisasi dalam mempresentasikan informasi publik secara langsung.

Tabel 3.21 Capaian IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW III	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	95	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

1. ***Capaian IK Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan III tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. ***Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025***

   IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian triwulan III tahun 2024 dengan triwulan III tahun 2025.

3. ***Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

   a. **Analisis Keberhasilan**

   LPSPL Sorong memiliki tim PPID yang bertugas melaksanakan IK keterbukaan informasi publik sehingga IK ini dapat berjalan secara optimal. Selain itu LPSPL Sorong juga memiliki berbagai macam sosial media yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

   b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

   Tantangan pelaksanaan IK ini adalah adanya penundaan pelaksanaan pengadaan lautra yang dilaksanakan berdasar Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*. Sehingga informasi terkait pengadaan ini mengalami penundaan.

   c. **Solusi**

   Tim PPID LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan pihak Sesditjen PKRL terkait kondisi anggaran lautra.

4. ***Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 14***

Triwulan III 2025, LPSPL Sorong aktif menerbitkan publikasi pelayanan publik berupa pelayanan jenis ikan dilindungi dan pelyanan pemanfaatan ruang laut, pelayanan PPID dan informasi kegiatan LPSPL Sorong di sosial media, pemenuhan dokumen PPID dan Monev *Self Assessment Quisioner* (SAQ) tahun 2025.

5. ***Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025***

Pada triwulan IV tahun 2025 LPSPL Sorong akan menerbitkan informasi terkait pelayanan public berupa pelayanan jenis ikan dilindungi dan informasi lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong.

3.8. Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2025, DIPA awal LPSPL Sorong tahun 2025 sebesar Rp40.227.209.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp8,450,539,000,00; PNBP sebesar Rp1,625,000,000,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp30,151,670,000,00 yang terbit pada tanggal 30 November 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 24 Januari 2025. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2025 dengan Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2025 tanggal 2 Desember 2024. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp30,651,670,000,00, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp1.125.000.000,00, dan program dukungan manajemen sebesar Rp8.450.539.000,00. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 4 kegiatan yaitu (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp825,000,000,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8,450,539,000,00. Pada revisi DIPA 1 s.d 4 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp10.502.610.000,00 yang terdapat pada belanja 52 sedangkan pada Revisi DIPA ke 5 tanggal 17 Juni 2025 dengan nomor SP DIPA-032.07.2.477440/2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNBP

sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. Realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Rincian serapan anggaran LPSPL Sorong Per RO (Lampiran V) yaitu Rp 7,291,063,470 atau 18.12% dari anggaran Rp40,227,209,000 dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.22 Rincian Sumber Anggaran LPSPL Sorong Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Sumber Anggaran Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	5,400,000,000	3,308,207,539	61,26
Belanja Barang	3,050,539,000	1,440,668,258	47,23
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	**8,450,539,000**	**4,748,875,797**	**56,20**
Sumber Anggaran PNBP			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1,625,000,000	395,829,052	24,36
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	**1,625,000,000**	**395,829,052**	**24,36**
Sumber Anggaran PLN			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	29,817,545,000	2,146,358,621	7,20
Belanja Modal	334,125,000	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	**29,817,545,000**	**2,146,358,621**	**7,20**
TOTAL AKUMULASI	**40,227,209,000**	**7,291,063,470**	**18.12**

Berdasarkan tabel (Tabel 3.22) tersebut dapat diketahui secara umum serapan LPSPL Sorong masih sangat rendah. Serapan terbesar berasal dana yang bersumber Rupiah Murni sebesar Rp4,748,875,797,00 dari belanja 51 dan belanja 52 dengan persentase serapan

56,20%. Sementara itu anggaran yang berasal dari PNBP memiliki realisasi sebesar Rp395,829,059,00 yang berasal dari belanja 52 dengan persentase serapan 24,36% dan Pinjaman Luar Negeri serapannya sebesar 7,20% dengan realisasi serapan Rp2,146,358,621,00. Rendahnya serapan PNBP disebabkan karena pada triwulan III anggaran tersebut baru dilakukan buka blokir pada revisi POK ke 5 pada 17 Juni 2025 dan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada akhir September sehingga serapannya akan tercatat pada Triwulan IV. Anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri serapannya relative rendah hanya sebesar 7,20% disebabkan karena adanya penundaan pelaksanaan anggaran lautra berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada awal Triwulan III.

Sementara itu berdasarkan rincian realisasi anggaran LPSPL Sorong per RO (lampiran V) diketahui bahwa serapan LPSPL Sorong sebesar 7,291,063,470 jika dihitung menggunakan pagu tanpa blokir serapannya sebesar 18,12%.

Realisasi anggaran pada masing-masing indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong sebagai berikut (Tabel 3.23).

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Per Indikator pada Perjanjian Kinerja

No.	IKU	Kegiatan Pendukung		Pagu (Rp)	Pagu Efektif	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi Netto (Pagu Tanpa Nilai Blokir) (%)
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	a	Lautra	29,817,545,000	22,132,831,000	2,146,358,621	7,684,714,000	27,671,186, 379	9.70
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	b	Lautra						
TOTAL				**29,817,545,00**	**22,132,831,00**	**2,146,358,62**	**7,684,714,00**	**27,671,186**	**9.70**

				0	**0**	**1**	**0**	**,379**	
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	a	Data dan Informasi Konservasi jenis Ikan	500,000,000	346,329,000	172,465,972	153,671,000	327,534,028	49.8
TOTAL				**500,000,000**	**346,329,000**	**172,465,972**	**153,671,000**	**327,534,028**	
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)			-	-	-	-	-	0
TOTAL				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	a	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar)	300,000,000	156,630,000	63,102,054	143,370,000	236,897,946	40,29
TOTAL				**300,000,000**	**156,630,000**	**63,102,054**	**143,370,000**	**236,897,946**	
8	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	a	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	359,874,000	229,936,000	75,859,465	129,938,000	284,014,535	37.81
		b	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	465,126,000	150,000,000	84,401,561	315,126,000	380,724,439	47.07
TOTAL				**825,000,000**	**379,936,000**	**160,261,026**	**445,064,000**	**664,738,974**	**84.88**
9	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	a.	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	83,632,000	14,573,000	11,044,171	69,059,000	72,587,829	75.79
TOTAL				**83,632,000**	**14,573,000**	**11,044,171**	**69,059,000**	**72,587,829**	**75.79**

10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	a.	Layanan BMN	10,904,000	9,104,000	9,103,650	1,800,000	1,800,350	100
		b.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	79,952,000	170,000	-	79,782,000	79,952,000	0
		c	Layanan Manajemen Keuangan	22,804,000	10,583,000	10,582,850	12,221,000	12,221,150	100
TOTAL				113,660,000	19,857,000	19,686,500	93,803,000	93,973,500	99.14
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	a.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran		-			-	
TOTAL				-	-	-	-	-	
12	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	a.	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		-			-	
TOTAL				-	-	-	-	-	
13		a.	Layanan Manajemen SDM Program dan Anggaran	84,812,000	180,000	-	84,632,000	84,812,000	0
TOTAL				84,812,000	180,000	-	84,632,000	84,812,000	0
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai)	a.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7,059,000	208,000	-	6,851,000	7,059,000	0
TOTAL				7,059,000	208,000	-	6,851,000	7,059,000	0
15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	a.	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	325,392,000	219,321,000	157,238,225	106,071,000	168,153,775	71.69
TOTAL				325,392,000	219,321,000	157,238,225	106,071,000	168,153,775	71.69
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) (PLN)	a	Penjangkauan dan pelibatan Pemangku Kepentingan	334,125,000	334,125,000	-	-	334,125,000	0

TOTAL				334,125,000	334,125,000	-	-	334,125,000	0
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	a	Layanan Kehumasan	14,984,000	170,000	-	14,814,000	14,984,000	0
TOTAL				14,984,000	170,000	-	14,814,000	14,984,000	0
18	Non IKU	a	Belanja Pegawai	5,400,000,000	5,400,000,000	3,308,207,539		2,091,792,461	61.28
		b	Belanja Operasional perkantoran	2,421,000,000	1,603,334,000	1,252,699,362	817,666,000	1,168,300,638	78,13
TOTAL				7,821,000,000	7,003,334,000	4,560,906,901	817,666,000	3,260,093,099	65
TOTAL AKUMULASI				**40,227,209,000**	**30,607,494,000**	**7,291,063,470**	**9,619,715,000**	**32,936,145,530**	**23.82**

Tabel 3.24 Daftar kegiatan dan pagu anggaran

No	Kode KRO	Uraian	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektiv	Sumber Anggaran		
						RM	PNBP	PLN
1	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (PNBP)	500,000,000	153,671,000	346,329,000		500,000,000	
		Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (PLN)	30,151,670,000	7,684,714,000	22,466,956,000			30,151,670,000
2	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300,000,000	143,370,000	156,630,000		300,000,000	
3	2366	Penataan Ruang Laut	825,000,000	445,064,000	379,936,000		825,000,000	
4	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	8,450,539,000	**1,192,896,000**	7,257,643,000	8,450,539,000		
TOTAL			**40,227,209,000**	**9,619,715,000**	**30,607,494,000**	**8,450,539,000**	**1,625,000,000**	**30,151,670,000**

3.9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan capaian kinerja Unit Kerja lain bertujuan untuk melihat apakah capaian LPSPL Sorong sudah maksimal atau dapat ditingkatkan lagi dengan mengacu dari capaian unit kerja lainnya.

Tabel 3.25 Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada triwulan I tahun 2025.

No	Indikator Kinerja	LPSPL Sorong TW II			LPSPL Serang TW II			BPSPL Makassar TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	LPSPL Sorong TW II			LPSPL Serang TW II			BPSPL Makassar TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
5	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	LPSPL Sorong TW II			LPSPL Serang TW II			BPSPL Makassar TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
	LPSPL Sorong (Indeks)									
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	76	100	120%	76	100	120%	76	100	120%
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

: Capaian lebih rendah

: Capaian sama

Dari tabel diatas diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan target antara LPSPL Sorong, LPSPL Serang dan BPSPL Makassar. Sebanyak tiga indikator capaiannya sama antara ketiga UPT tersebut pada triwulan III tahun 20225 yaitu :

a. Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), LPSPL Sorong dan LPSPL Serang sama sama menargetkan 3 dokumen pada triwulan III tahun 2025 dan capaiannya sebesar 3 dokumen atau tercapai 100%. LPSPL Sorong, LPSPL Serang dan BPSPL Makassar telah menyelesaikan dokumen Laporan SPIP Triwulan IV tahun 2024 dan Laporan SPIP Triwulan I tahun 2025 dan Laporan SPIP Triwulan III tahun 2025 pada triwulan III tahun 2025.
b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%), LPSPL Sorong , LPSPL Serang dan BPSPL Makassar memiliki target triwulan III tahun 2025 sebesar 95 dan capaiannya sebesar 100 atau tercapai 105,26%. Hal ini sesuai dengan surat penyampaian surat penyampaian Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.2556/DJPK.1/TU.210/X/2025 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan III Tahun 2025
c. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%), LPSPL Sorong dan LPSPL Serang memiliki target triwulan III tahun 2025 sebesar 76% dan capaiannya sebesar 100% atau tercapai 120% dari nilai target. Hal ini sesuai dengan nota dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 Tanggal 8 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025.

BAB
4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong pada Triwulan III Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. LPSPL Sorong mempunyai 2 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
   a. IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong tercapai 100% dari target 95% dengan persentase kinerjaku 105,26%
   b. IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 100% dari target 76% dengan persentase kinerjaku 120%
2. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target kinerja yaitu IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen dengan persentase capaian 100%,
3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mandatory LPSPL Sorong Triwulan III Tahun 2025 adalah **109,47** (kategori hijau=baik).

4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait kinerja Triwulan III Tahun 2025, yaitu:

1. Terdapat deviasi halaman III DIPA yang tinggi oleh karena itu disarankan agar dapat melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan melakukan revisi administrasi penyesuaian Halaman III DIPA.
2. Perlu dilakukan pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara berkala

3. Pada Triwulan III serapan anggaran yang bersumber dari PNBP dan sudah Pinjaman Luang Negeri masih rendah oleh sebab itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat segera melaksanakan kegiatan dengan berpatokan rencana kegiatan dan RPD.

4.3. Tindaklanjut Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Terdapat rekomendasi yang telah tindak lanjuti untuk perbaikan kinerja LPSPL Sorong pada tahun 2025 diantaranya :

Tabel 3.26 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan I Tahun 2025			
1.	Terdapat blokir pada DIPA LPSPL Sorong yang akan dibuka oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong melakukan revisi DIPA setelah blokir terbuka agar dapat melaksanakan kegiatan pendukung Indikator Kinerja	Telah dilakukan revisi DIPA untuk pendukung pembukaan blokir	https://bit.ly/daddukLKJ2025
2.	Pada Triwulan II akan ada buka blokir anggaran yang bersumber dari PNBP oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong berkoordinasi dengan Sesditjen DJPK terkait MP PNBP untuk memastikan waktu anggaran dapat digunakan sehingga dukungan anggaran terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja dapat optimal.	LPSPL Sorong telah berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait MP PNBP	https://bit.ly/daddukLKJ2025

3.	Terdapat Indikator Kinerja yang menggunakan sumber dana Pinjaman Luar Negeri, untuk mengantisipasi sumber dana tersebut masih belum dapat digunakan disarankan agar LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan mitra kerja konservasi dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan dapat dilakukan bersama.	LPSPL Sorong telah berkoordinasi dengan mitra kerja kawasan konservasi dan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan	https://bit.ly/daduk LKJ2025
Triwulan II Tahun 2025			
1	Terdapat deviasi halaman III DIPA yang tinggi oleh karena itu disarankan agar dapat melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan melakukan revisi administrasi penyesuaian Halaman III DIPA.	Telah dilakukan revisi DIPA pada Triwulan III tahun 2025	https://bit.ly/daduk LKJ2025
2	Perlu dilakukan pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Telah dilakukan pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara berkala	https://bit.ly/daduk LKJ2025
3	Pada Triwulan II telah terdapat buka blokir anggaran yang bersumber dari PNBP dan	Telah dilakukan pelaksanaan kegiatan yang anaggarannya bersumber dari PNBP dan	https://bit.ly/daduk LKJ2025

	sudah terdapat izin penggunaan anggaran Lautra oleh sebab itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat segera melaksanakan kegiatan dengan berpatokan rencana kegiatan dan RPD.	Pinjaman Luar Negeri	

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong TA 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendrik Sombo**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Pihak Pertama Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong
Victor Gustaaf Manoppo	**Hendrik Sombo**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	3
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	20
3.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong	3.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	3
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	88
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	87
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)	95
		12.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75
		14.	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	80
		15.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	30.651.670.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000
3.	Perencanaan Ruang Laut	825.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8.450.539.000
Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2025		**40.227.209.000**

Jakarta, . Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal	Plh. Kepala Loka Pengelolaan Sumber
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Daya Pesisir dan Laut Sorong
Victor Gustaaf Manoppo	**Hendrik Sombo**

Lampiran II. Sertifikat ISO 9001:2015

QAI

Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11130 - A

QAI Indonesia Certification

Hereby grants to:

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Jl. KPR PAM No 10, Klawuyuk Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or form only the address given below in accordance with the Quality Management System in compliance with

ISO 9001:2015

Approved Scope to which this Certificate refers:

Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered and Protected Fish

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QA Indonesia

Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 26 January 2024 - **Re-assessment Date** : 26 January 2025

Date of Initial Registration : 26 January 2024 - **Certificate Expiry Date** : 26 January 2027

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board.

QAI INDONESIA CERTIFICATION

Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng, Jakarta, 10310

Telp: 021 - 21230866

Email: admin@qai.co.id

Website QAI: www.qai.co.id

Website Acreditor: www.ascb.com

ASCB Accreditation Services Worldwide

ISO 9001 2015

Lampiran III. Sertifikat ISO 37001:2016

QAI

Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11130 - E

QAI Indonesia Certification

Hereby grants to:

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Jl. KPR PDAM KM. 10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or form only the address given below in accordance with the Anti-bribery Management System in compliance with

ISO 37001:2016

Approved Scope to which this Certificate refers:

Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered and Protected Fish

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 37001:2016 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QAI Indonesia

Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 19 July 2024 - **Re-assessment Date** : 19 July 2025
Date of Initial Registration : 19 July 2024 - **Certificate Expiry Date** : 19 July 2027

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board. This certificate has a three-year certification cycle and must be renewed every year before the re-assessment date.

QAI INDONESIA CERTIFICATION
Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng, Jakarta, 10310
Telp: 021 - 21230866
Email: admin@qai.co.id
Website QAI: www.qai.co.id
Website Acreditor: www.ascb.com

ASCB Accreditation Services Worldwide

ISO 37001 2016

Lampiran IV. Piagam Penghargaan LPSPL Sorong Tahun 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.362/MEN-KP/III/2025

Penghargaan diberikan kepada:

Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Jakarta, 6 Maret 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Lampiran V. Realisasi Anggaran Per RO Triwulan III Tahun 2025

		DITJEN PRL-LOKA PSPL SORONG	VOLUME	KELUARAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
032.07.477440					**40,227,209,000**	**7,291,063,470**	**32,631,658,556**
032.07.FD		**Program Kualitas Lingkungan Hidup**			**30,651,670,000**	**2,318,824,593**	**28,332,845,407**
2362		**Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut**			**30,651,670,000**	**2,318,824,593**	**28,332,845,407**
2362.QMA		Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	1	Dokumen	500,000,000	172,465,972	327,534,028
2362.QMA.002		**Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan**			500,000,000	172,465,972	327,534,028
051		**Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan**			500,000,000	172,465,972	327,534,028
A		*Verifikasi Lapang Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan*			29,092,000		29,092,000
	B	*Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan*			124,579,000		124,579,000
	C	*Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan*			332,295,000	161,785,972	170,509,028
	D	*Verifikasi Lapang Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan*			14,034,000	10,680,000	3,354,000
2362.REA		Konservasi Kawasan/rehabilitasi Ekosistem	814000	Hektar	30,151,670,000	2,146,358,621	28,005,311,379
2362.REA.004		**Oceans For Prosperity Project -Lautra**			30,151,670,000	2,146,358,621	28,005,311,379
051		**Surveillance Patrol Inside**			**30,151,670,000**	2,146,358,621	28,005,311,379
A		*Surveillance Patrol Inside*			2,500,000,000	1,173,088,769	1,326,911,231
C A	*C*	*Monitoring Biofisik, Sosial Ekonomi dan Budaya di KKD Mare-Maluku Utara*			917,236,000	485,147,111	432,088,889
	D	*Penjangkauan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan 2025*			1,400,000,000	487,162,741	912,837,259
	E	*Reviu dan Update Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah)-Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya*			1,000,000,000		1,000,000,000

	F	*Pendampingan Revieu-Update Rencana Pengelolaan KKD Mare*			1,000,000,000		1,000,000,000
	G	*Penanganan Biota Laut Dilindungi, Terancam Punah dan/atau Appendiks Cites*			100,000,000	960,000	99,040,000
	GB	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Mare, Kei Kecil dan Babar)*			2,526,029,000		2,526,029,000
	GC	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Kei Kecil dan Maluku)*			574,939,000		574,939,000
	GD	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Babar Provinsi Maluku)*			658,232,000		658,232,000
	H	*Fasilitas Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil*			192,764,000		192,764,000
	HA	*Penyusunan Master Plan Penguatan Kawasan Konservasi Daerah Wilayah Kerja LPSPL Sorong*			851,852,000		851,852,000
	I	*Daya Dukung Pemanfaatan Kawasan Konservasi Daerah Kepualuan Raja Ampat*			350,000,000		350,000,000
	IA	*Penyusunan DED Kawasan Konservasi (Daerah)*			3,073,662,000		3,073,662,000
	J	*Penyusunan Master Plan Penguatan Kawasan Konservasi Daerah Wilayah Kerja LPSPL Sorong*			4,115,844,000		4,115,844,000
	M	*Reviu-Update Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat*			270,000,000		270,000,000
	N	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Babar*			300,000,000		300,000,000
	Q	*Reviu-Update Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Mare*			270,000,000		270,000,000
	R	*Sarana dan Prasarana*			200,000,000		200,000,000
	O	*Alokasi OMS*			9,600,949,000		9,600,949,000
032.07.HB		**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**			**1,125,000,000**	**223,363,080**	**681,961,946**
2365		**Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**			**300,000,000**	**63,102,054**	**236,897,946**

2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan[Base Line]	1		300,000,000	63,102,054	236,897,946
2363.PBW.001	**Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	300,000,000	63,102,054	236,897,946
051	**Rekomendasi Pemafaatn Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (PNBP)**			300,000,000	63,102,054	236,897,946
A	*Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil*			143,370,000		143,370,000
B	*Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil*			156,630,000	63,102,054	93,527,946
2366	**Penataan Ruang Laut**			**825,000,000**	**160,261,026**	**445,064,000**
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan[Base Line]	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	825,000,000	160,261,026	445,064,000
2366.PBT.009	**Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Beresiko Rendah**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	825,000,000	160,261,026	445,064,000
052	**Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut**			330,574,000	75,859,465	129,938,000
A	*Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut*			129,938,000		129,938,000
B	*Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut*			200,636,000	75,859,465	
053	**Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut**			494,426,000	84,401,561	315,126,000
A	*Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang*			139,438,000		139,438,000
B	*Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut*			175,688,000		175,688,000
D	*Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut*			179,300,000	84,401,561	94,898,439
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			8,450,539,000	4,748,875,797	3,616,851,203
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			8,450,539,000	4,748,875,797	3,616,851,203
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	6	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8,179,339,000	4,727,248,776	3,452,090,224

2367.EBA.956	**Layanan BMN**	**2**	**Layanan**	**10,904,000**	**9,103,650**	**1,800,350**
051	**Layanan BMN**			**10,904,000**	**9,103,650**	**1,800,350**
A	*Rekonsiliasi SAI - SIMAK BMN*			10,904,000	9,103,650	1,800,350
2367.EBA.958	**Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi**	**1**	**Layanan**	**14,984,000**	**-**	**14,984,000**
051	**Layanan Kehumasan**			**14,984,000**	**-**	**14,984,000**
A	*Layanan Kehumasan*			14,984,000		14,984,000
2367.EBA.960	**Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**	**1**	**Layanan**	**7,059,000**	**-**	**7,059,000**
053	**Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP**			**7,059,000**	**-**	**7,059,000**
A	*Zona Integritas WBK/WBBM LPSPL Sorong*			7,059,000		7,059,000
2367.EBA.962	**Layanan Umum**	**1**	**Layanan**	**325,392,000**	**157,238,225**	**168,153,775**
051	**Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan**			**325,392,000**	**157,238,225**	**168,153,775**
A	*Layanan Tata Usaha*			325,392,000	157,238,225	168,153,775
2367.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**7,821,000,000**	**4,560,906,901**	**3,260,093,099**
001	**Gaji dan Tunjangan**			**5,400,000,000**	**3,308,207,539**	**2,091,792,461**
A	*Pembayaran gaji dan tunjangan*			5,400,000,000	3,308,207,539	2,091,792,461
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**			2,421,000,000	1,252,699,362	1,168,300,638
A	*Operasional Kantor*			1,895,402,000	1,105,614,151	789,787,849
B	*Pemeliharaan Kantor*			525,598,000	147,085,211	378,512,789
2362.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			84,812,000	21,627,021	63,184,979
2367.EBC.954	**Layanan Manajemen SDM**	**31**	**Orang**	84,812,000	21,627,021	63,184,979

051	**Layanan Manajemen SDM**			84,812,000	21,627,021	63,184,979
A	*Layan Pengelolaan Kinerja Pegawai*			84,812,000	21,627,021	63,184,979
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	186,388,000	21,627,021	164,760,979
2367.EBD.952	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran**	**1**	**Dokumen**	**79,952,000**	**-**	**79,952,000**
051	**Layanan Perencanaan Program dan Anggaran**			**79,952,000**	**-**	**79,952,000**
A	*Perencanaan Program dan Anggaran*			79,952,000		79,952,000
2367.EBD.953	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**	**1**	**Dokumen**	83,632,000	11,044,171	72,587,829
051	**Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan**			83,632,000	11,044,171	72,587,829
A	*Laporan Program dan Kegiatan lingkup DJPRL*			83,632,000	11,044,171	72,587,829
2367.EBD. 955	**Layanan Manajemen Keuangan**		**1**	**22,804,000**	**10,582,850**	**12,221,150**
051	**Layanan Manajemen Keuangan**			**22,804,000**	**10,582,850**	**12,221,150**
A	*Manajemen dan Pelaporan Keuangan*			22,804,000	10,582,850	12,221,150